



road map  
**agribisnis**  
**padi**

**KABUPATEN BOGOR**

DEPARTEMEN PERTANIAN  
SEKRETARIAT JENDERAL BIRO PERENCANAAN

2007



Bibliografi



road map  
**agrribisnis  
padi**  
**KABUPATEN BOGOR**

<sup>18</sup>  
633-159 82  
DEP.  
r.  
1.703 4



DEPARTEMEN PERTANIAN  
SEKRETARIAT JENDERAL BIRO PERENCANAAN  
2007



# KATA PENGANTAR KEPALA BIRO PERENCANAAN DEPARTEMEN PERTANIAN

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan tentang pentingnya perencanaan yang berhorizon jangka menengah. Namun hingga saat ini di daerah Kabupaten/Kota instrumen perencanaan jangka menengah sub sektor pertanian yang spesifik komoditas belum tersusun dan dipublikasi secara luas. Sementara di sisi lain sangatlah dirasakan kebutuhan terhadap keberadaan dokumen perencanaan jangka menengah spesifik komoditas yang dapat mawadahi kepentingan masyarakat petani dan pelaku usaha serta mampu memformulasikan upaya dan langkah-langkah operasional program dan kegiatan pengembangan komoditas secara bertahap dan berkesinambungan.

Dalam rangka mendorong daerah agar dapat menyusun langkah-langkah strategis dan operasional dalam pengembangan komoditas sebagai panduan bersama bagi pemerintah dan masyarakat, maka pada awal tahun 2007 Departemen Pertanian telah menerbitkan Pedoman Umum Penyusunan Road Map Komoditas Unggulan Pertanian Kabupaten/Kota yang diharapkan dapat menjadi acuan daerah dalam menyusun materi perencanaan pengembangan komoditas yang sesuai dengan kebijakan strategis nasional serta sesuai pula dengan potensi dan permasalahan spesifik di masing masing daerah.

Sebagai upaya untuk memahami proses penyusunan road map dan sekaligus menghimpun bahan masukan bagi penyempurnaan Pedoman Umum, telah dilakukan kerja sama dengan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor dalam menyusun road map salah satu komoditas unggulan Kabupaten Bogor. Latar belakang pemilihan Kabupaten Bogor semata-mata didasarkan pada pertimbangan kedekatan lokasi dengan Kantor Pusat Departemen Pertanian, sehingga lebih memudahkan komunikasi dan koordinasi. Road map ini sepenuhnya disusun oleh aparat perencana dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor. Namun dalam pelaksanaannya didampingi Tim Biro Perencanaan dan dibantu oleh peneliti dari Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian.

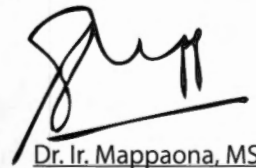


Dari hasil penyusunan road map ini telah diperoleh masukan yang berharga untuk penyempurnaan Pedoman Umum, terutama dalam menetapkan kriteria komoditas unggulan pertanian Kabupaten/Kota serta dalam menetapkan target sasaran tahunan dan sasaran jangka panjang. Road map agribisnis padi Kabupaten Bogor ini juga telah disusun dengan menghimpun saran dan masukan dari unit kerja perencanaan Eselon I lingkup Departemen Pertanian.

Dengan tersusunnya road map ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ir. Noviana Enimarlupi (Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor) yang telah bersedia untuk bekerjasama dengan Biro Perencanaan Departemen Pertanian. Terima kasih kami sampaikan pula kepada Dr. Edi Basuno dan Ir. Rudy S. Rivai, MS (peneliti dari Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian) yang telah membantu Biro Perencanaan dalam penyusunan road map ini.

Akhirnya dengan mengharapkan rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, kami berharap semoga road map ini sekurang-kurangnya dapat menjadi contoh minimal bagi Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia dalam menyusun road map untuk komoditas unggulan daerah masing-masing.

Jakarta, Desember 2007  
Kepala Biro Perencanaan



Dr. Ir. Mappaona, MS  
NIP. 080.051.666



# KATA PENGANTAR KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BOGOR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmatNya Road Map Agribisnis Padi Kabupaten Bogor dapat diselesaikan. Road Map ini disusun dengan tujuan untuk menyediakan bahan panduan dalam perencanaan pengembangan komoditas padi dan instrumen untuk mengarahkan dan mendorong masyarakat petani dalam mengembangkan usaha taninya serta sekaligus mendorong pelaku usaha untuk membuka usaha dan investasi baru yang terkait dengan pengembangan komoditas padi di Kabupaten Bogor.

Proses penyusunan road map ini diawali dengan melakukan analisis perbandingan antar komoditas untuk menetapkan komoditas unggulan yang ada di Kabupaten Bogor. Selanjutnya dilakukan identifikasi terhadap dokumen kebijakan nasional dan daerah Propinsi/Kabupaten serta mengumpulkan data dan informasi yang berhubungan dengan pengembangan padi dalam rentang waktu tahun 2001 – 2006. Berdasarkan data dan informasi tersebut telah dilakukan analisis terhadap keragaan kondisi saat ini serta permasalahan dan peluang dalam pengembangan padi di Kabupaten Bogor.

Dalam rangka menyusun produk perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat telah dilakukan upaya pendekatan perencanaan secara partisipatif dengan melakukan kegiatan pemahaman pedesaan secara partisipatif (*Participatory Rural Appraisal/PRA*) di salah satu sentra produksi padi di Kabupaten Bogor. Dari hasil PRA tersebut telah diperoleh informasi yang merupakan titik kritis yang dihadapi masyarakat dalam mengembangkan agribisnis padi di Kabupaten Bogor. Informasi titik kritis tersebut selanjutnya menjadi salah satu landasan pemikiran dalam menetapkan strategi, kebijakan, tujuan dan sasaran dalam mengembangkan agribisnis padi di Kabupaten Bogor.

Hambatan utama yang dihadapi dalam penyusunan road map ini adalah keterlambatan dalam mengumpulkan data dan informasi dari sektor pendukung lain, terutama informasi yang berhubungan dengan kerusakan jaringan irigasi. Di samping itu ketersediaan waktu dan anggaran tidak memungkinkan untuk melakukan PRA di lokasi sentra yang lebih luas serta penyelenggaraan forum konsultasi publik yang melibatkan segenap pelaku agribisnis padi dari hulu sampai hilir



Manfaat road map ini telah dirasakan, karena rancangan road map telah dapat dijadikan bahan dalam rapat kordinasi pembahasan program pengembangan agribisnis padi di tingkat Propinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bogor. Rancangan road map ini telah pula mendapatkan masukan dari para pejabat perencana Eselon I dalam acara presentasi yang diselenggarakan di Departemen Pertanian.

Dengan tersusunnya road map ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Ir. Mappaona, MS (Kepala Biro Perencanaan Departemen Pertanian) yang telah menjadikan Kabupaten Bogor sebagai pilot proyek penyusunan road map tingkat nasional, Dr. Edi Basuno dan Ir. Rudy S. Rivai, MS (peneliti dari Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian) serta Tim Perencana dari Biro Perencanaan Departemen Pertanian yang telah membantu melakukan pendampingan dalam penyusunan road map ini.

Kami menyadari bahwa road map yang disusun ini masih jauh dari sempurna, terutama keterbatasan informasi dari sektor pendukung serta keterbatasan sumberdaya manusia perencana yang ada di SKPD Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor. Dengan demikian kritik dan saran sangat kami harapkan untuk menyempurnakan road map ini.

Akhirnya semoga road map agribisnis padi Kabupaten Bogor ini dapat kiranya bermanfaat sebagai acuan pembanding bagi daerah lain dalam menyusun road map untuk komoditas padi maupun komoditas unggulan lain dari Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Bogor, Desember 2007  
Kepala Dinas Pertanian dan  
Kehutanan Kabupaten Bogor



Ir. Noviana Enimarlupi  
NIP. 080.051.918



# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR KEPALA BIRO PERENCANAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BOGOR .....</b>	<b>iv</b>
<b>I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Tujuan dan Manfaat Roadmap .....	14
<b>II. KONDISI AGRIBISNIS PADI SAAT INI.....</b>	<b>15</b>
2.1 Kondisi Agribisnis Padi Kabupaten Bogor .....	16
2.2 Sumberdaya Manusia .....	16
2.3 Sub Sistem Agribisnis Hulu .....	20
2.4 Sub Sistem Usaha Pertanian Primer .....	28
2.5 Sub Sistem Agribisnis Hilir .....	30
<b>III. PROSPEK, POTENSI, ARAH DAN BAGAN PENGEMBANGAN .....</b>	<b>37</b>
3.1 Prospek.....	38
3.2 Potensi Pengembangan.....	43
3.3 Arah Pengembangan.....	45
3.4 Bagan Roadmap Pengembangan Komoditas.....	47
<b>IV. TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>49</b>
4.1 Tujuan.....	50
4.2 Sasaran.....	50
<b>V. STRATEGI, KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....</b>	<b>53</b>
5.1 Strategi.....	54
5.2 Kebijakan.....	54
5.3 Program .....	55
5.4 Kegiatan.....	55
<b>VI. KEBUTUHAN INVESTASI.....</b>	<b>57</b>
<b>VII. DUKUNGAN KEBIJAKAN .....</b>	<b>61</b>
<b>VIII. PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
<b>Lampiran .....</b>	<b>67</b>



# I. PENDAHULUAN



## 1.1. Latar Belakang

### a. Keadaan Umum Wilayah

Kabupaten Bogor merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Jawa Barat dengan luas wilayah 298.838 hektar, terletak antara 6°19'-6°47' Lintang Selatan dan 106°21'-107°13' Bujur Timur. Secara geografis, di sebelah utara Kabupaten Bogor berbatasan dengan Kabupaten Tangerang, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten/Kota Bekasi dan Kota Depok, sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Karawang, Kabupaten Sukabumi dan Cianjur dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lebak, Propinsi Banten serta di tengah-tengahnya terletak Kota Bogor.

Letak Kabupaten Bogor yang berada ditengah-tengah lingkaran jalur Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, Cianjur dan Sukabumi memberikan kemudahan dalam aksesibilitas perekonomian, sehingga sangat berdekatan dengan pasar potensial, dukungan ketersediaan infrastruktur (jalan tol dan jalur kereta api) serta adanya peluang sebagai daerah yang menerima limpahan pembangunan DKI Jakarta (daerah penyangga). Secara administratif Kabupaten Bogor terdiri dari 40 Kecamatan, 409 Desa dan 17 Kelurahan dengan ibu kota Kabupaten berada di Cibinong. Jumlah penduduk Kabupaten Bogor pada tahun 2005 tercatat sebanyak 4.100.934 jiwa.

Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian Kabupaten Bogor berdasarkan harga konstan tahun 2.000 mengalami pertumbuhan sebesar - 0,59 % yang berasal dari subsektor bahan makanan sebesar - 2,23 %, perkebunan 1,59 %, ternak dan hasilnya 2,42 %, kehutanan 2,97 % dan perikanan sebesar 1,82 %. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa produksi bahan makanan menurun dalam kurun waktu 2000 - 2005. Di sisi lain kebutuhan bahan makanan semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Dengan asumsi laju pertumbuhan penduduk sebesar 2 % per tahun, maka kebutuhan konsumsi beras diperkirakan akan meningkat dari 492.112 ton pada tahun 2005 menjadi 503.393 ton pada tahun 2011.

Dari 298.838 Ha luas Kabupaten Bogor, 149.748 hektar diantaranya telah dimanfaatkan untuk kegiatan usaha pertanian yang terdiri dari sawah 48.598 hektar, pekarangan 34.505 hektar, tegalan/kebun 55.729 hektar, ladang/huma 6.876 hektar, penggembalaan/padang 3.151 hektar, perkebunan 29.857,89 hektar, lahan kehutanan 108.033,69 hektar, lahan lainnya 29.462,43 hektar serta lahan pertanian yang sementara tidak diusahakan 889 hektar.

Komoditas pertanian yang diusahakan petani di Kabupaten Bogor mencakup tanaman pangan, yaitu ubi jalar, padi, jagung, ubi kayu, kacang hijau, kacang tanah, kedelai, padi gogo; tanaman hortikultura sayuran, yaitu wortel, tomat, kangkung, petsai, kubis, buncis, bayam, mentimun, kacang merah, kacang panjang, cabe dan bawang daun; buah-buahan, yaitu manggis, durian, rambutan, belimbing, pepaya, jambu biji, nenas, alpukat, duku, sirsak, jambu



air, nangka, mangga, jeruk, pisang, sawo, salak serta tanaman hias, yaitu anggrek; tanaman perkebunan, yaitu vanili, jahe, kapolaga, karet, kakao, pala, lengkuas, aren, kopi, lada, kunyit, teh dan kencur. Komoditas peternakan yang diusahakan adalah sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing, domba, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, ayam ras pembibit dan itik.

#### **b. Agroekosistem dan Agroekonomi Padi Kabupaten Bogor**

Sentra padi di Kabupaten Bogor tersebar di 10 Kecamatan, yaitu Tanjungsari, Cariu, Jonggol, Sukamakmur, Pamijahan, Leuwiliang, Sukajaya, Cigudeg, Jasinga, dan Nanggung. Luas areal baku lahan dan kapasitas sentra produksi padi tahun 2006 dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1. Lokasi Sentra Produksi, Luas Baku Lahan dan Kapasitas Produksi Padi Kabupaten Bogor Tahun 2006**

No	Kecamatan	Luas Baku Lahan (Ha)	Kapasitas Produksi (Ton GKG)
1	Tanjungsari	2.405	21.951
2	Cariu	2.618	42.488
3	Jonggol	3.535	38.290
4	Sukamakmur	3.033	17.897
5	Pamijahan	3.234	37.103
6	Leuwiliang	1.792	18.752
7	Sukajaya	1.600	14.440
8	Cigudeg	2.223	23.083
9	Jasinga	2.055	17.112
10	Nanggung	1.625	11.052
	Jumlah	24.120	242.167

Berdasarkan kondisi agroekosistem Kabupaten Bogor, 15 % luas wilayah merupakan areal persawahan dengan tingkat curah hujan berkisar antara 2.500 – 5.000 mm per tahun, sehingga memungkinkan ketersediaan air untuk pesawahan sepanjang tahun. Terdapat enam Daerah Aliran Sungai (DAS) yang berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai sumber air bagi lahan pertanian di Kabupaten Bogor, yaitu DAS Cisadane seluas 124.013 hektar, DAS Ciliwung seluas 28.636 hektar, DAS Kali Bekasi seluas 41.173 hektar, DAS Citarum hilir seluas 85.196 hektar, DAS Cidurian seluas 44.454 hektar dan DAS Cimanceuri seluas 22.498 hektar.

Di Kabupaten Bogor terdapat pula daerah rawan bencana kekeringan yang dibedakan menjadi 3 (tiga) kelas berdasarkan luasan areal yang potensial tertimpa bencana, yaitu kurang dari 50 ha, 50 - 100 ha dan di atas 100 ha. Kecamatan yang termasuk rawan bencana kekeringan

dengan luas kurang dari 50 ha, yaitu Gunung Putri, Cileungsi, Klapanunggal, Cijeruk, Pamijahan, Leuwiliang, Cibungbulang, Nanggung, Cigudeg, Rumpin, Jasinga dan Tenjo. Sementara itu daerah yang rawan kekeringan dengan luas antara 50 – 100 ha adalah Kecamatan Parung Panjang dan Kecamatan yang rawan kekeringan mencapai lebih dari 100 Ha adalah Kecamatan Jonggol, Cariu dan Sukamakmur. Daerah rawan banjir di Kabupaten Bogor mencakup luasan kurang dari 50 hektar tersebar di Kecamatan Jonggol, Cibinong, Gunung Sindur, Cigudeg, dan Jasinga. Adapun Kecamatan Sukajaya merupakan Kecamatan yang rawan banjir dengan luas lebih dari 100 hektar.

Dilihat dari tipologi lahan, areal persawahan di Kabupaten Bogor secara umum tersebar mulai dari dataran rendah hingga bergelombang dengan ketinggian tempat 15 – 500 m di atas permukaan laut yang menyebar dari sebelah utara hingga bagian tengah wilayah Kabupaten Bogor. Areal persawahan tersebut mencakup Kecamatan Jonggol, Cariu, Tanjungsari, Cileungsi, Klapanunggal, Gunung Putri, Citeureup, Cibinong, Babakan Madang, Bojong gede, Kemang, Sukaraja, Rancabungur, Tajurhalang, Ciseeng, Rumpin, Parung, Gunung Sindur, Parungpanjang, Tenjo, Jasinga, Ciampea, Dramaga, Leuwisadeng serta sebagian Cigudeg dan sebagian Leuwiliang. Adapun daerah perbukitan dengan ketinggian tempat 500 – 2.000 m di atas permukaan laut menyebar di bagian selatan Kabupaten Bogor diantaranya adalah Kecamatan Sukajaya, Nanggung, Leuwiliang, Tenjolaya, Pamijahan, Tamansari, Caringin, Cigombong, Cijeruk, Ciawi, Cisarua dan Megamendung.

Menurut peta digital sebaran jenis tanah yang dikeluarkan oleh Puslitbangtanak, Badan Litbang Departemen Pertanian (2002), 20 % jenis tanah Kabupaten Bogor didominasi oleh jenis Asosiasi Latosol Merah, Laotosol Coklat Kemerahan dan Laterit Air Tanah. Jenis tanah ini tersebar di wilayah Kabupaten Bogor bagian utara yaitu kecamatan Gunungsindur, Parung, Cibinong, Kemang, Rancabungur, Bojonggede, Tajurhalang, Citeureup, Babakan Madang, Gunung Putri, Cileungsi, Jonggol, Cariu, Tanjungsari, dan Sukamakmur. Jenis tanah kedua dan ketiga terluas adalah Asosiasi Latosol Coklat Kemerahan dan Latosol Coklat serta Podsolik Merah Kekuningan dengan luasan masing-masing mencakup 8,7 % dan 7,5 %.

Adanya perbedaan tipologi lahan berdasarkan ketinggian menyebabkan keragaman dalam aplikasi teknologi pengolahan lahan, penggunaan varietas dan teknologi budidaya lainnya. Pengolahan lahan di dataran tinggi lebih banyak dilakukan dengan pemanfaatan hewan ternak (terutama kerbau). Adapun di dataran rendah sudah banyak menggunakan handtraktor. Varietas padi lokal berumur panjang lebih disukai di dataran tinggi dan yang berumur pendek lebih disukai di dataran rendah.

Padi merupakan tanaman pangan terpenting di Kabupaten Bogor, hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa setiap petani yang mempunyai lahan basah membudidayakan komoditas tersebut minimal satu tahun satu kali (IP 100). Analisis Location Quotient (LQ) terhadap

komoditas pertanian utama menunjukkan data LQ berturut-turut sebagai berikut ubi jalar = 2,66; ubi kayu = 1,87, padi = 0,99, kacang hijau = 0,56, kacang tanah = 0,64, padi gogo = 0,75, jagung = 0,50 dan kedelai = 0,18. Namun demikian analisis lebih lanjut terhadap parameter lainnya, yaitu trend produktivitas, trend luas tanam, trend harga, tenaga kerja, R/C, dan aspek kebijakan menunjukkan bahwa komoditas padi merupakan komoditas yang memiliki nilai ekonomis penting bagi kesejahteraan masyarakat petani dan pertumbuhan ekonomi wilayah yang berada pada urutan kedua setelah ubi jalar.

Secara sosial budaya, sebagian besar masyarakat petani di Kabupaten Bogor sudah sejak lama mengembangkan komoditas padi. Nilai ekonomi komoditas padi menjadi semakin penting bila dikaitkan dengan besarnya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk. Jumlah penduduk Kabupaten Bogor pada tahun 2005 sebanyak 4.100.934 jiwa, dengan asumsi tingkat konsumsi sebesar 120 kg beras/kapita/orang, maka untuk memenuhi kebutuhan konsumsi beras harus tersedia pasokan sebanyak 492.112 ton per tahun. Di sisi lain, tingkat produksi padi yang dapat dicapai baru sebesar 419.339 ton GKP atau setara dengan 265.002,3 ton beras. Jumlah ini hanya mampu memenuhi kebutuhan 53,85 % penduduk. Selama ini kekurangan kebutuhan beras di Kabupaten Bogor masih didatangkan dari daerah sekitarnya, terutama dari Kabupaten Cianjur, Karawang dan Indramayu.

Sementara itu, berdasarkan hasil identifikasi daerah rawan pangan di Kabupaten Bogor, sampai dengan Oktober 2006 dengan indikator luas tanam, luas panen dan tingkat kerusakan, terdapat 8 (delapan) Kecamatan yang tergolong prioritas daerah rawan pangan, yaitu Kecamatan Pamijahan, Leuwiliang, Sukajaya, Cijeruk, Parung, Nanggung, Ciampea dan Jasinga. Akan tetapi tingkat kerawanan pangan seluruh kecamatan tersebut masih termasuk dalam kategori aman, karena tingkat dampak dari luas tanam, luas panen dan tingkat kerusakan masih kurang dari 10 %.

Jumlah penduduk Kabupaten Bogor yang berprofesi di bidang pertanian pada tahun 2004 sebanyak 261.880 jiwa atau 20,78 % dari angkatan kerja. Pada tahun 2005 terjadi penurunan jumlah angkatan kerja pertanian sebesar 10,48 % menjadi 234.426 jiwa atau 18,14 % dari total angkatan kerja. Berdasarkan data tahun 2005, rata-rata luas kepemilikan sawah per rumah tangga petani di Kabupaten Bogor adalah sebesar 0,20 hektar dengan jumlah tenaga kerja dan anggota keluarga yang terlibat dalam usaha tani padi sebesar 703.278 orang.

Hasil analisa usaha tani padi tahun 2005 menunjukkan bahwa nilai total produksi dari usaha tani padi sebesar Rp. 6.974.500,- dengan tingkat pendapatan bersih usaha tani sebesar Rp. 564.500,- dan tingkat pendapatan bersih petani sebesar Rp. 2.974.500,- tiap satu hektarnya. Walaupun nilai usaha tani padi ini masih lebih rendah dibandingkan usahatani palawija lainnya seperti jagung, ubi kayu, ubi jalar dan kacang hijau, tetapi masih diminati oleh petani karena padi merupakan kebutuhan primer masyarakat.

### c. Keragaan Pengembangan Padi Kabupaten Bogor Tahun 2001 - 2005

Peringkat produksi padi Kabupaten Bogor dibandingkan Kabupaten lain di Propinsi Jawa Barat berada pada urutan 13 dengan rata-rata produksi pada tahun 2000 - 2004 sebesar 417.751,75 ton atau sebesar 4 % dari total produksi Propinsi Jawa Barat. Sementara itu posisi peringkat produktivitas berada pada urutan ke 11 dengan tingkat produktivitas rata-rata 5,24 ton/ha. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir antara 2001 - 2005, produksi padi di Kabupaten Bogor cenderung menurun sebesar 1,004 %, hal ini sesuai dengan kecenderungan penurunan luas tanam sebesar 2,100 %, dan penurunan luas panen sebesar 1,389 %, namun *trend* produktivitas meningkat sebesar 0,605 %. Keragaan pengembangan komoditas padi di Kabupaten Bogor tahun 2001 - 2005 dapat dilihat pada Tabel 2.

**Tabel 2. Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Kabupaten Bogor Tahun 2001-2005**

Luas Panen, Produksi dan Produktivitas	Tahun					
	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Luas Panen (Ha)	81.031	87.702	72.075	84.975	76.801	74.251
Produksi (Ton GKG)	425.078	426.540	37.431	445.958	412.084	401.066
Produktivitas (Ton/Ha)	52,46	52,74	51,81	52,48	53,66	54,01

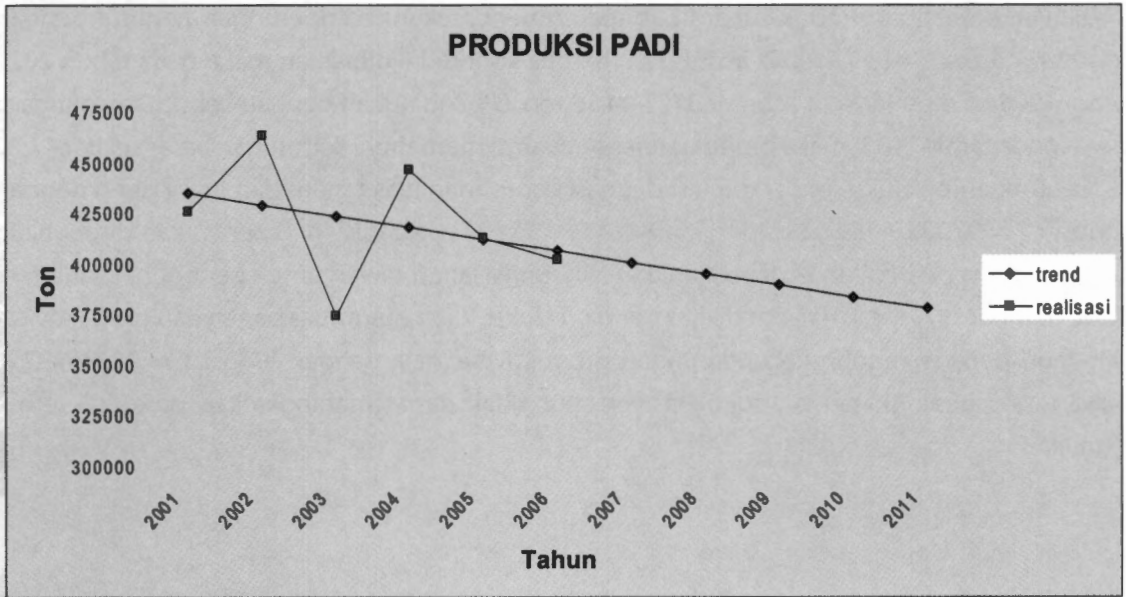
Selama periode 2001 - 2006, luas pertanaman padi di Kabupaten Bogor rata-rata sebesar 80.411 ha/tahun dengan penurunan sebesar 2,10 %/tahun. Dibandingkan dengan tanaman palawija, penurunan luas pertanaman padi paling sedikit. Pada periode yang sama penurunan luas pertanaman jagung sekitar 3,5 kali dan luas pertanaman ubi jalar sekitar 3,1 kali.

Rata-rata tingkat produktivitas padi di Kabupaten Bogor dalam kurun waktu 2001-2005 sebesar 52,63 ku/ha, tingkat produktivitas ini masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata produktivitas padi di Jawa Barat yaitu sebesar 53,3 ku/ha, tetapi lebih tinggi dibandingkan produktivitas nasional sebesar 47,81 ku/ha. Hal ini menggambarkan bahwa penggunaan benih unggul padi bermutu di tingkat petani belum merata dan penerapan teknologi belum dapat berkembang seperti yang diharapkan.

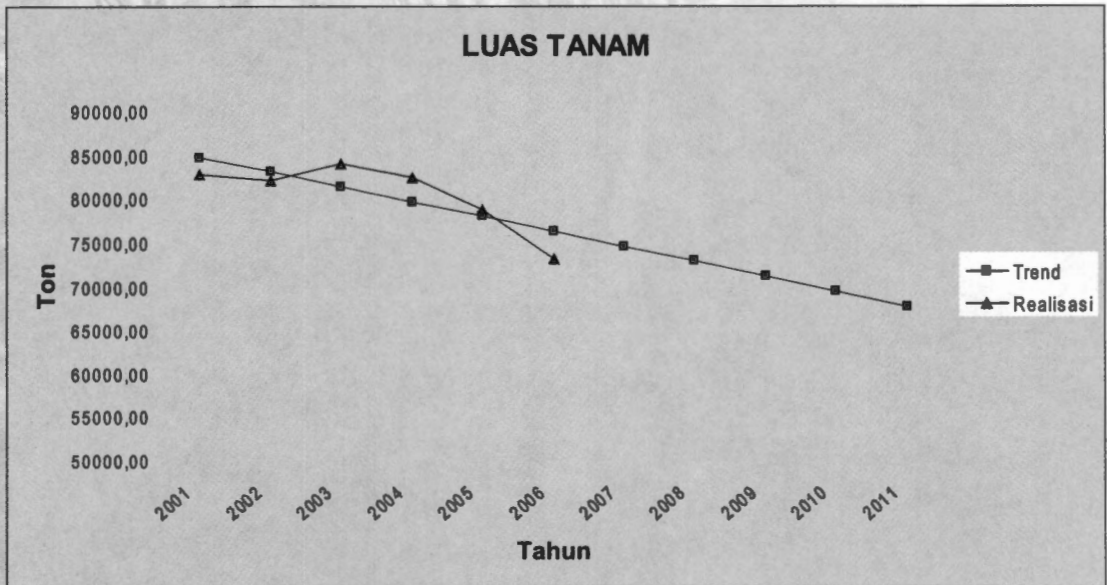


Perkembangan produksi padi di Kabupaten menunjukkan kecenderungan menurun dengan fungsi produksi  $Y = 459.916,27 - 56.862,9 X$ . Apabila kondisi ini dibiarkan maka pada tahun 2011 produksi padi diperkirakan sebesar 377.404,52 ton. Dibandingkan dengan kebutuhan pangan/beras pada tahun 2011, maka produksi tersebut hanya memenuhi kebutuhan beras sekitar 47,23 %. Penurunan produksi ini berkorelasi dengan penurunan luas tanam dan luas panen dengan fungsi :  $Y = 86.333,8 - 1692,23 X$  dan  $Y = 84.842,8 - 1534,37 X$ . Kondisi ini diperkirakan disebabkan oleh pesatnya perubahan kepemilikan dan alih fungsi lahan sawah untuk penggunaan lainnya. Pada Gambar 1, 2, 3, dan 4 dapat dilihat trend produksi, luas tanam, luas panen dan produktivitas tanaman padi. Walaupun kecenderungan produktivitas naik dengan fungsi  $Y = 51,74 - 0,32 X$ , akan tetapi peningkatan produktivitas tersebut tidak dapat meningkatkan produksi secara signifikan.



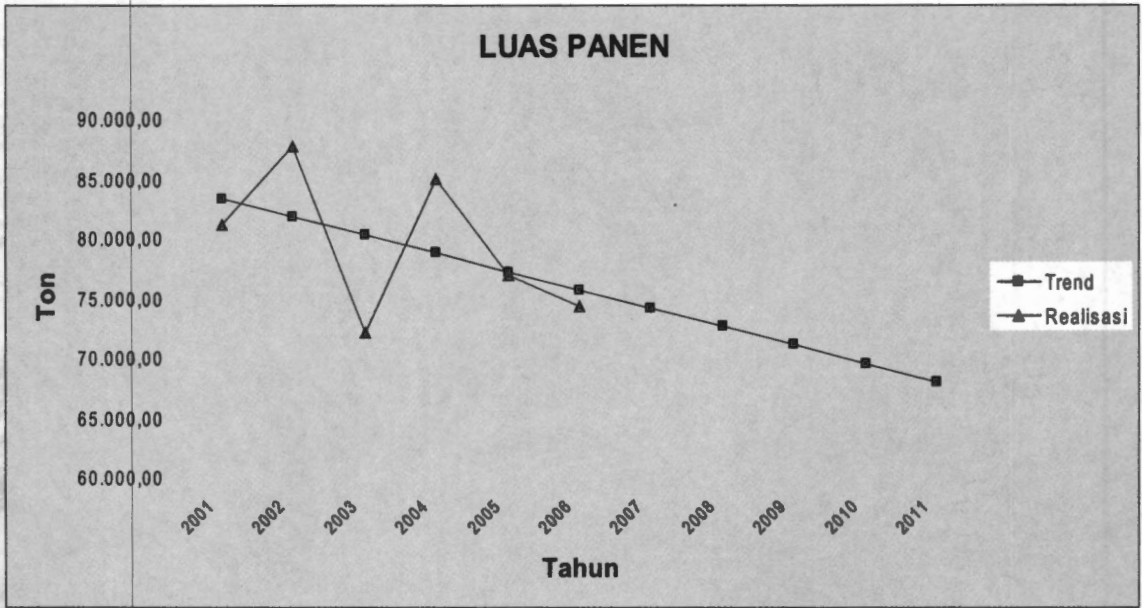


**Gambar 1. Tren Produksi Padi Tahun 2001 – 2011**

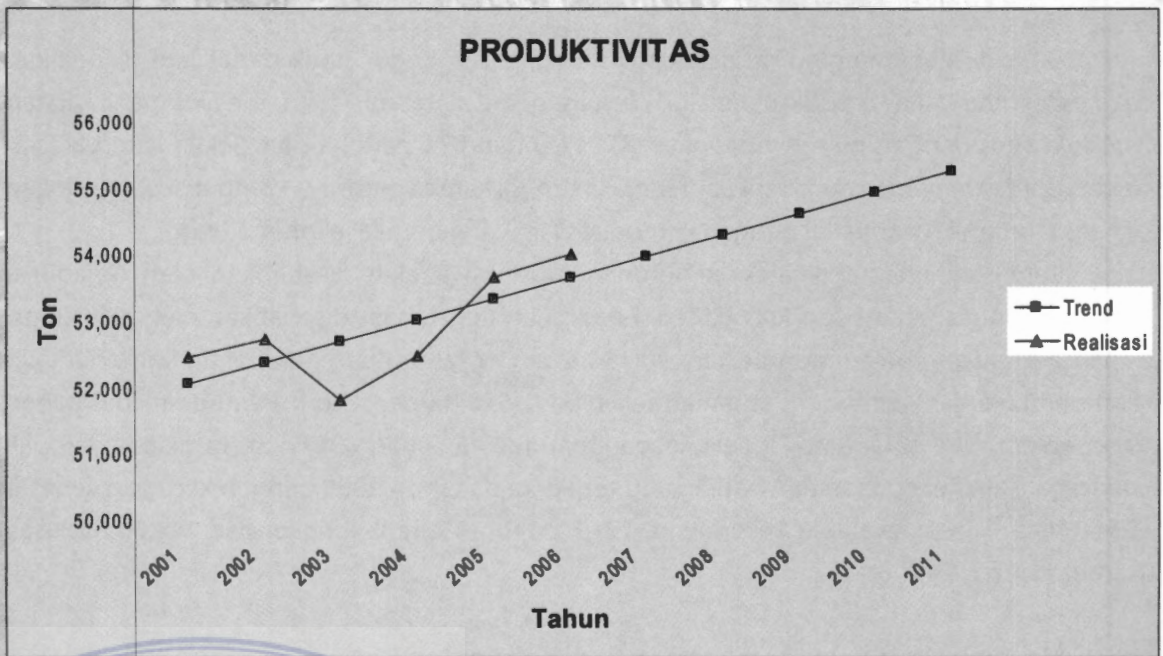


**Gambar 2. Tren Luas Tanam Padi Tahun 2001 - 2011**





**Gambar 3. Tren Luas Panen Padi Tahun 2001 - 2011**



**Gambar 4. Tren Produktivitas Padi Tahun 2001 - 2011**





Data di atas mengindikasikan bahwa Kabupaten Bogor tidak dapat lagi diandalkan dalam peningkatan produksi melalui perluasan areal, tetapi harus melalui peningkatan produktivitas dengan mengembangkan PTT VUB dan PTT padi hibrida. Selain keterbatasan lahan, *opportunity cost* usaha tani padi semakin tinggi karena pesatnya kompetisi penggunaan lahan, terutama antara padi dengan komoditas lain yang bernilai ekonomi tinggi.

Berdasarkan data di atas, penurunan produksi adalah disebabkan oleh terjadinya penurunan luas tanam dan luas panen. Penurunan luas tanam disebabkan oleh alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian (136,5 ha/per tahun) dan perubahan komoditi (alih komoditi) menjadi komoditas tanaman selain padi (520 ha/per tahun). Penurunan luas panen disebabkan oleh serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) serta akibat dampak bencana alam kekeringan dan banjir yang terjadi pada tahun 2006 dengan kerugian sebesar 1.680 ha sawah puso akibat kekeringan, 191,3 ha rusak karena longsor dan 144,66 ha rusak karena banjir.

#### **d. Masalah Utama Pengembangan Padi Kabupaten Bogor**

Permasalahan utama dalam pengembangan padi mencakup penurunan luas tanam dan luas panen yang disebabkan oleh perubahan fungsi lahan sawah. Penurunan fungsi



lahan sawah terjadi karena belum optimalnya sistem pengairan, belum optimalnya aplikasi teknologi budidaya hingga teknologi pasca panen. Hal tersebut dapat terjadi disebabkan oleh tidak meratanya kualitas sumberdaya manusia pertanian dan terbatasnya sarana prasarana produksi padi sawah serta adanya anomali iklim dan eksplosif hama dan penyakit.

Sebagai kawasan yang lokasinya berdekatan dengan pusat pemerintahan dan pusat-pusat perekonomian menyebabkan terjadinya perubahan persepsi masyarakat terhadap nilai lahan. Lahan tidak lagi dipandang sebagai salah satu faktor produksi pertanian yang penting karena bila dinilai secara ekonomi harganya tidak tinggi. Saat ini lahan dijadikan sebagai barang investasi sehingga banyak diburu dan dicari oleh para spekulan yang mengharapkan keuntungan berlipat dari jual beli lahan. Hal ini mendesak para petani padi sawah untuk dengan mudahnya melakukan alih fungsi lahan, terlebih lagi bila membandingkan hasil pertanian padi sawah yang kurang menguntungkan dibanding dengan usaha lain. Tingkat ancaman alih fungsi lahan pertanian rata-rata sebesar 656 ha/tahun, yaitu 136,5 Ha beralih menjadi lahan non pertanian dan 513,5 Ha beralih menjadi lahan kering.

Organisme pengganggu tanaman yang ada di Kabupaten Bogor adalah hama penggerek batang, tikus, tungro, penyakit BLB, *blast* dan ganjur. Hama penggerek batang banyak terdapat di Kecamatan Jonggol, Cariu, Tanjungsari, Klapanunggal, Sukamakmur, Caringin, Cigombong, Cijeruk, Ciomas, Tenjolaya, Pamijahan, Tamansari, Dramaga, Ciampea, Leuwisadeng, Nanggung, Leuwiliang, Cigudeg, Parung panjang, Rumpin, Rancabungur, Kemang, Ciseeng, Gunung Sindur, Bojonggede dan Cibungbulang. Hama tikus banyak terdapat di Kecamatan Cileungsi, Jonggol, Sukamakmur, Ciomas, Cigombong, Pamijahan, Tamansari, Dramaga, Cibungbulang, Leuwiliang, Kemang, Ciseeng dan Rumpin. Sedangkan hama tungro banyak terdapat di Tenjolaya, Ciomas, Ciawi, Megamendung, Cisarua, Ciampea dan Dramaga. Perkiraan total kehilangan hasil akibat serangan OPT utama pada tahun 2006 sebesar 2.016 ton, yaitu oleh serangan tikus telah menurunkan produksi sebesar 1.148 ton, oleh penggerek batang sebesar 712 ton dan oleh tungro sebesar 156 ton,.

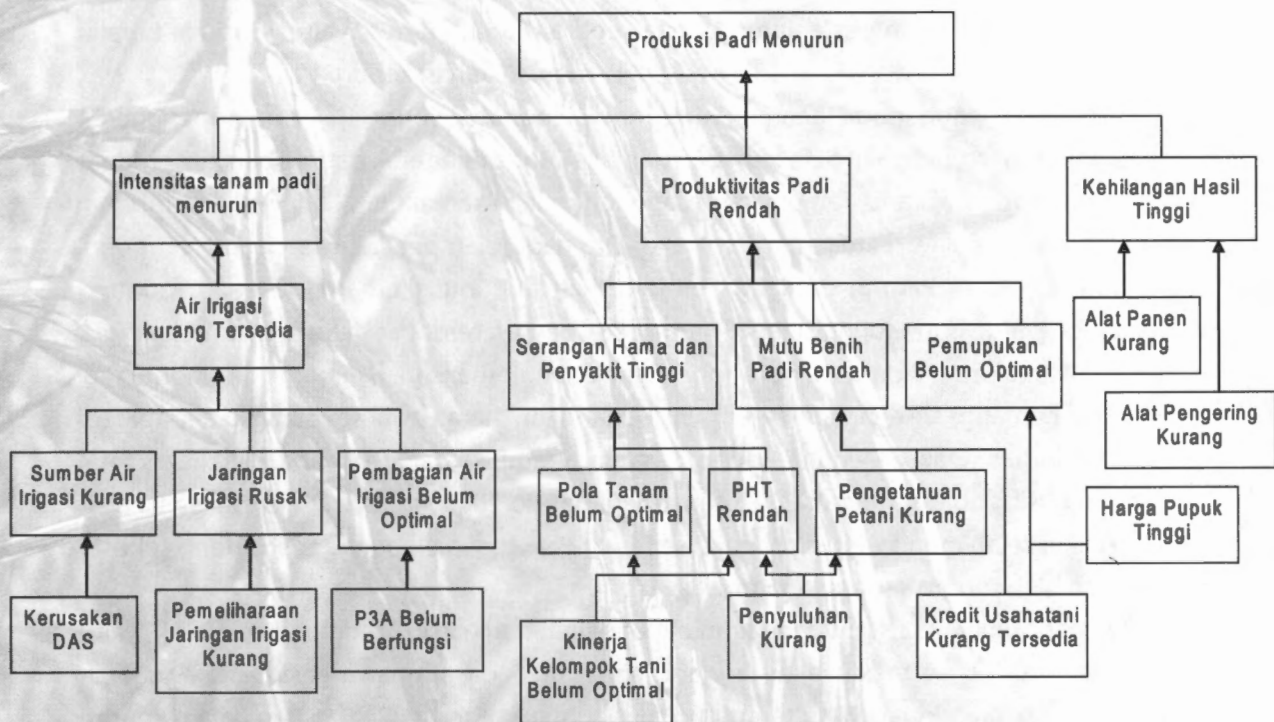
Belum optimalnya sistem pengairan dapat dilihat dari masih rendahnya tingkat IP, yaitu rata-rata sebesar 1,77 serta banyaknya terjadi kerusakan pada jaringan irigasi. Dari 879 daerah irigasi, kondisi daerah irigasi yang tergolong rusak ringan sebesar 32,88 % dan dalam kondisi rusak berat sebesar 40,16 %.

Optimalisasi lahan sawah di dataran tinggi dihadapkan pada terbatasnya keberadaan alat pengolahan lahan untuk menyesuaikan dengan musim tanam. Belum berkembangnya penggunaan alat mesin pertanian (hand tractor) disebabkan oleh terbatasnya jalan usaha tani hingga ke lahan sawah petani hingga ke perbukitan.

Penggunaan teknologi budidaya yang belum sesuai dengan anjuran juga merupakan masalah dalam pengembangan padi, tingkat kehilangan hasil pada panen dan pasca panen

masih cukup tinggi, yaitu 15 % yang terjadi mulai saat panen, perontokan, pengangkutan, pengeringan, penggilingan dan penyimpanan. Pada proses panen rendahnya penggunaan sabit bergerigi dan cara pemotongan yang kurang tepat menyebabkan tingkat kehilangan hasil hingga mencapai 4 %. Hal ini juga terjadi pada proses perontokan yang belum menggunakan alas panen, banting bertirai dan pedal tresher yang menyebabkan tingkat kehilangan hasil hingga sebesar 4%. Sementara pada proses pengangkutan, pembersihan, dan pengeringan tingkat kehilangan hasil mencapai 1 % serta pada proses penggilingan dan penyimpanan tingkat kehilangan hasil mencapai 2 %.

Masalah-masalah budidaya padi dapat digambarkan dalam pohon masalah seperti dapat dilihat pada Gambar 5.



**Gambar 5. Pohon Masalah Produksi Padi Kabupaten Bogor**



### **e. Peluang dan Dukungan Kebijakan Pengembangan Padi Kabupaten Bogor**

Di Kabupaten Bogor, komoditas padi jarang diperjualbelikan oleh petani, karena sebagian besar digunakan untuk konsumsi petani, kecuali bagi petani yang memiliki luas lahan yang cukup luas. Mengingat posisi Kabupaten Bogor yang berdekatan dengan kota-kota besar maka peluang pemasaran cukup prospektif. Masyarakat kota dengan tingkat ekonomi cukup baik menjadi target pasar potensial terutama dalam penetapan harga beras berkualitas medium dan tinggi.

Faktor pendukung bagi pengembangan komoditas padi di Kabupaten Bogor adalah ketersediaan air yang cukup, terlebih di dataran tinggi, dekat dengan pasar sarana produksi seperti benih, pupuk, pestisida dan alsintan. Disamping itu, keberadaan pusat-pusat penelitian dan perguruan tinggi yang berkecimpung di bidang pertanian memudahkan akses dan adopsi terhadap informasi dan teknologi budidaya, teknologi pengolahan hasil dan pemanfaatan limbah hasil pertanian.

Dukungan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dalam pengembangan komoditas padi dapat dilihat dari kebijakan, program, kegiatan dan anggaran yang dialokasikan. Fasilitas dukungan dari Pemerintah Pusat terutama dari Departemen Pertanian adalah berupa fasilitas kegiatan penangkaran benih padi baik oleh instansi pemerintahan (Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor) maupun oleh petani penangkar, peningkatan mutu intensifikasi padi, penanganan pasca panen, bantuan benih, BPP model dan bantuan operasional penyuluh. Fasilitas dukungan dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat adalah berupa fasilitas kegiatan peningkatan produksi tanaman pangan (P2TP). Adapun Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor secara khusus telah memfasilitasi kebijakan pemanfaatan ruang dengan Perda RTRW serta peninjauan kembali bagi perijinan konversi lahan sawah yang secara de jure memungkinkan tetapi secara de facto merupakan lahan sawah yang produktif dan beririgasi serta kegiatan penerapan teknologi PTT, SRI, pengendalian hama terpadu, dan pembibitan.

Dukungan kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam pengembangan komoditas padi yang masih dibutuhkan adalah : (a) Pengembangan perbenihan, (b) Penyediaan sarana prasarana produksi, (c) Transfer dan penerapan teknologi budidaya spesifik lokasi, (d) Penanganan panen dan pasca panen, (e) optimalisasi kelembagaan petani, (f) Perbaikan sistem pengolahan dan pemasaran hasil, (g) perbaikan jaringan irigasi, dan (h) penurunan/pencegahan alih fungsi lahan.



## 1.2. Tujuan dan Manfaat Road Map

Tujuan penyusunan Roadmap Pengembangan Komoditas Padi Sawah Kabupaten Bogor ini adalah:

1. Menyediakan bahan panduan dalam perencanaan pengembangan komoditas padi sebagai salah satu komoditas unggulan di Kabupaten Bogor, sehingga dapat memacu pertumbuhan wilayah serta mensejahterakan pelaku usaha, terutama masyarakat petani.
2. Menyediakan bahan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dalam merencanakan penumbuhkembangan komoditas padi secara bertahap dan berkelanjutan.
3. Mengarahkan masyarakat petani dan pelaku usaha dalam memajukan usaha komoditas unggulan padi.
4. Mendorong masyarakat petani dan pelaku usaha untuk membuka usaha dan investasi baru yang terkait dengan pengembangan komoditas padi.

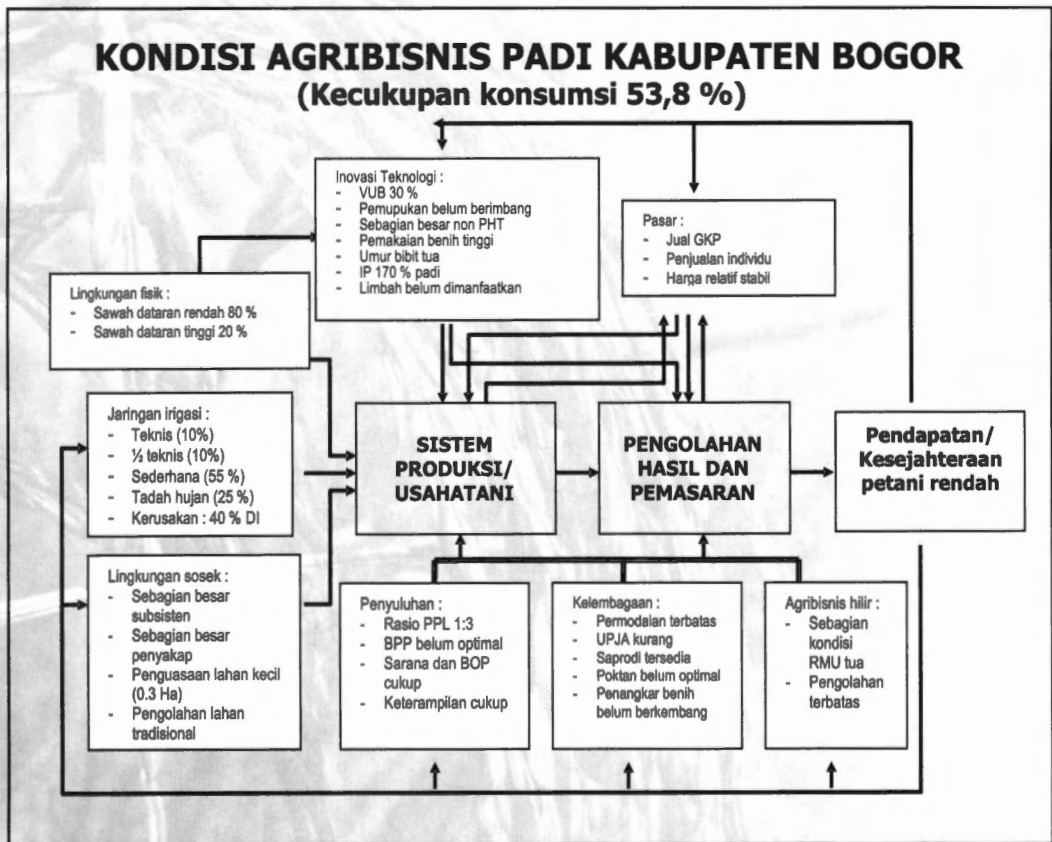


## II. KONDISI AGRIBISNIS PADI SAAT INI



## 2.1. Kondisi Agribisnis Padi Kabupaten Bogor

Secara umum gambaran pengembangan komoditas padi di Kabupaten Bogor masih difokuskan untuk pemenuhan konsumsi pangan pokok bagi penduduk. Pengolahan produk olahan pangan yang bersumber dari beras relatif kecil. Pengembangan usaha tani sebagai produsen/penangkar benih, baik untuk pemenuhan kebutuhan lokal maupun untuk diperdagangkan ke daerah lain juga terbatas. Disamping itu pemanfaatan limbah berupa jerami dan sekam sebagai bahan pakan ternak, produksi pupuk organik maupun agribisnis hortikultura seperti jamur juga masih belum berkembang. Pada Gambar 6 dapat dilihat keadaan agribisnis padi Kabupaten Bogor.



Gambar 6. Kondisi Agribisnis Padi Kabupaten Bogor

## 2.2. Sumberdaya Manusia

### a. Sumberdaya Manusia Aparat

Keberhasilan pengembangan komoditas padi sangat tergantung kepada sumberdaya manusia sebagai pelaku usaha, baik sumberdaya aparat, petani, maupun komponen aparatur

lainnya. Aparat pembina teknis pertanian di Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor terdiri dari Jabatan Fungsional, Penyuluh Pertanian Lapang, Penyuluh Pertanian Kecamatan, Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman, Petugas Balai Pengawasan Dan Sertifikasi Benih Dan Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan jumlah dan kualifikasi tersaji pada Tabel 3. Status pegawai dari Jabatan Fungsional, PPK/PPL, POPT dan Kepala UPTD adalah Pegawai Negeri Sipil. Sementara itu staf UPTD sebanyak 10 orang masih berstatus tenaga honorer.

**Tabel 3. Jenis dan Jumlah Aparat Jabatan Fungsional dan Kualifikasi Pendidikan Aparat Pembina Teknis SKPD Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor Tahun 2006.**

No	Jenis Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Jabatan Fungsional Penyuluh	S-2	3
		S-1	1
2.	PPL/PPK	S-2	1
		S-1	42
		D-IV	4
		D-III	64
		D-I	1
		SLTA	8
3	POPT/BPSB	S1	8
		D-III	1
		D-I	8
		SLTA	2
4	UPTD -Kepala UPTD	S-2	3
		S-1	7
		D-III	1
		SLTA	1
	- Staf UPTD	S-2	1
		S-1	11
		D-III	2
		SLTA	13
		SMP	2
		SD	4
Jumlah Total			214



Total aparat pembina teknis yang mempunyai kualifikasi pendidikan di atas SLTA sebanyak 194 orang ( 90,6 %), hal ini menunjukkan bahwa potensi dukungan sumberdaya manusia yang dimiliki cukup baik. Permasalahannya adalah luas wilayah binaan di Kabupaten Bogor cukup luas meliputi 409 Desa dan 17 Kelurahan dengan total luas wilayah binaan 298.838 Ha. Ratio pelayanan PPL/PPK adalah 1 : 2,6 yang berarti satu orang PPK/PPL melayani 2 sampai 3 Desa atau setiap satu orang mempunyai luas wilayah binaan 1981,9 Ha. Idealnya satu orang PPL/PPK melayani satu desa binaan atau sekitar 12 kelompok tani.

Sarana dan prasarana pendukung aparat teknis yang dimiliki Kabupaten Bogor adalah Kantor UPTD sebanyak 12 Unit, yaitu UPTD Penyuluhan Wilayah Cigudeg, Parungpanjang, Leuwiliang, Cibungbulang, Dramaga, Caringin, Cibinong, Gunung Putri, Jonggol, Cariu, dan Ciseeng. Setiap UPTD telah dilengkapi dengan peralatan kantor seperti meubeler, komputer, bagan warna daun (BWD), *soil test kit*, alat ubinan, perpustakaan, papan display, serta kendaraan roda dua. Seluruh PPL/PPK telah memiliki kendaraan roda dua untuk operasional serta diberikan biaya operasional pembinaan kelompok setiap bulannya. Kendala yang dihadapi oleh PPK/PPL adalah akses terhadap sumber informasi teknologi pertanian terkini yang sangat terbatas untuk materi penyuluhannya sehingga alih teknologi ditingkat petani menjadi sangat lambat.

Sekitar 80 % PPL telah mendapatkan beberapa pelatihan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi penyuluhan, diantaranya adalah Pelatihan Dasar I dan II bagi PPL, Pelatihan Teknologi Budidaya komoditas padi, palawija, hortikultura dan perkebunan, pelatihan alat mesin pertanian, SL-PHT, PRA, *Hazard Analysis Critical Control Point*, pengolahan hasil, aplikasi *soil test kit*, rancang bangun BPP, agribisnis, pertanian organik, konservasi tanah dan air, P3A Mitra Cai, Pendidikan Orang Dewasa (POD) dan Audio Visual Aid.

Dukungan kebijakan, program dan kegiatan Pemda Kabupaten Bogor yang dilakukan dalam pengembangan SDM aparat pembina teknis adalah diseminasi paket teknologi pengembangan padi dalam bentuk demplot PTT yang dilakukan oleh seluruh PPL, demplot SRI oleh beberapa PPL, *minimum tillage* (pengolahan lahan minimum), Tanpa Olah Tanah (TOT), pemupukan organik, SL-PHT serta pelatihan alsin/operator handtraktor,

Pelatihan yang masih diperlukan oleh aparat pembina teknis adalah Manajemen Penyuluhan Pertanian Partisipatif (MP3), pendalaman PRA, PTT, SRI, rancang bangun wilayah, manajemen kebun, penangkaran benih, pelatihan operasional komputer dan pembuatan proposal usaha.

## **b. Sumberdaya Manusia Petani**

Hasil pemutakhiran data kelompok tahun 2006, jumlah kelompok tani di Kabupaten Bogor sebanyak 2.060 kelompok, terdiri dari Kelompok Tani 1.910 kelompok, Kelompok Wanita

Tani sebanyak 59 kelompok, Taruna Tani sebanyak 91 kelompok. Gabungan kelompok tani (Gapoktan) sebanyak 227 unit, Koperasi Tani (KOPTAN) 82 unit, P4S 7 unit dan KTNA 40 orang. Sebagian besar kelompok tani masih dalam kelas Pemula, yaitu 459 kelompok, kelas Lanjut 758 kelompok, kelas Madya 616 kelompok dan Utama 227 kelompok.

**Tabel 4. Keragaan Kelembagaan Sumber Daya Manusia Petani Kabupaten Bogor Menurut Kecamatan Tahun 2006**

No	Kecamatan	Kelompok Tani			Gapoktan	Koperasi Tani	P4S	KTNA
		Kelompok Tani	KWT	Taruna Tani				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Cariu	55	1	-	14	1	-	1
2	Tanjungsari	58	-	-	5	1	-	1
3	Jonggol	84	7	5	17	-	-	1
4	Sukamakmur	58	1	-	8	-	-	1
5	Cileungsi	32	3	1	6	-	-	1
6	Gunung Putri	30	1	-	1	-	-	1
7	Citeureup	21	-	-	1	-	-	1
8	Klapanunggal	24	-	1	2	-	-	1
9	Cibinong	48	7	4	2	-	-	1
10	Sukaraja	54	2	-	6	-	-	1
11	Babakan madang	24	1	-	2	-	-	1
12	Bojonggede	24	-	-	9	-	-	1
13	Tajurhalang	21	1	2	12	-	-	1
14	Ciseeng	32	-	1	2	-	1	1
15	Parung	59	1	1	3	-	-	1
16	Gunung Sindur	40	1	4	1	-	-	1
17	Kemang	24	4	1	2	-	-	1
18	Rançabungur	30	4	5	3	-	1	1
19	Ciawi	69	1	-	13	-	-	1
20	Cisarua	52	1	3	1	1	1	1
21	Megamendung	44	-	-	7	-	-	1
22	Cijeruk	50	-	-	2	-	-	1
23	Cigombong	55	1	2	2	-	-	1
24	Caringin	49	-	-	2	-	3	1
25	Dramaga	40	2	3	14	-	-	1
26	Ciomas	41	1	2	3	-	-	1
27	Tamansari	51	3	6	4	-	1	1
28	Cibungbulang	74	7	9	3	-	-	1
29	Pamijahan	101	7	8	13	-	-	1
30	Ciampea	102	1	2	1	-	-	1
31	Tenjolaya	56	1	2	3	-	-	1
32	Leuwiliang	69	-	5	5	-	-	1
33	Leuwisadeng	41	-	4	3	-	-	1

No	Kecamatan	Kelompok Tani			Gapoktan	Koperasi Tani	P4S	KTNA
		Kelompok Tani	KWT	Taruna Tani				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	Nanggung	43	-	1	2		-	1
35	Rumpin	34	-	1	5		-	1
36	Cigudeg	43	-	12	15		-	1
37	Sukajaya	30	-	1	9		-	1
38	Jasinga	70	-	5	15		-	1
39	Parung Panjang	40	-	-	3		-	1
40	Tenjo	38	-	-	6		-	1
Jumlah		1.910	59	91	227	82	7	40

Penguasaan teknologi budidaya padi di tingkat petani baik dari segi teknis, sosial dan ekonomi rata-rata sebesar 62,12 % atau dalam kategori menengah, terutama dalam penggunaan benih varietas unggul baru yang telah dapat meningkatkan produktivitas dengan tingkat penggunaan sebesar 60,49% pada tahun 2006.

Secara umum kendala utama yang dihadapi dalam melakukan pembinaan manajemen dan teknis kepada petani padi adalah (1) tingginya kesenjangan pendapatan di bidang pertanian dengan bidang lainnya seperti jasa dan usaha menyebabkan kurang menarik untuk berinvestasi di bidang pertanian, (2) kultur budaya masyarakat Bogor yang sebagian besar adalah eks buruh perkebunan menyebabkan rendahnya inisiatif dan motivasi dalam memberdayakan sumberdaya lahan yang dimilikinya, (3) belum meratanya wawasan teknologi yang dimiliki oleh penyuluh, (4) faktor usia petani yang sebagian besar berusia lanjut menyebabkan rendahnya daya serap dan penerapan teknologi yang sudah diberikan, (5) belum kuatnya kelembagaan kelompok tani terutama dalam kerjasama kelompok, (5) belum optimalnya dukungan kebijakan maupun anggaran dari pemerintah dalam bidang pertanian.

Dibutuhkan penguatan kelembagaan kelompok tani dalam rangka meningkatkan produktivitas usaha budidaya tanaman padi melalui kegiatan pembinaan secara berkelanjutan dalam bentuk fasilitasi penyediaan sarana prasarana fisik sektor pertanian, fasilitasi penyediaan modal, fasilitasi alih teknologi pertanian, fasilitasi pengembangan usaha hulu, hilir dan jasa penunjang, peningkatan kemandirian dan kerjasama kelompok

### 2.3. Sub Sistem Agribisnis Hulu

#### a. Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lahan dan Air

Potensi lahan sawah di Kabupaten Bogor adalah 48.598 Ha, yaitu 15 % dari luas Kabupaten Bogor. Dari luasan tersebut, 4.542 Ha merupakan sawah beririgasi teknis, 4.746 Ha beririgasi setengah teknis, 12.281 Ha beririgasi sederhana, 15.409 Ha beririgasi desa/non PU dan 11.620 Ha merupakan sawah tadah hujan

Tingkat penggunaan lahan sawah untuk budidaya padi seluas 46.517 ha (96,1 %) dari luas sawah yang ada dengan sistem pengairan dengan irigasi teknis, ½ teknis dan sederhana seluas 23.653 ha (48,8%) dan sisanya dengan irigasi sederhana non teknis dan tadah hujan berturut-turut seluas 12.659 ha dan 10.205 ha.

Dalam rangka mendukung perbaikan sarana dan prasarana lahan dan air, secara khusus dalam tahun 2006 dan 2007 serta rencana 2008, Departemen Pertanian telah memberikan dukungan fasilitasi terhadap upaya perbaikan 1200 Ha JITUT dan 700 Ha JIDES untuk meningkatkan produksi padi di Kabupaten Bogor .

**Tabel 5. Keragaan Sistem Pengairan di Kabupaten Bogor Menurut Kecamatan Sentra Produksi Tahun 2006**

No	Kecamatan	Sistem Pengairan		
		Irigasi Teknis	Irigasi ½ Teknis	Irigasi Sederhana
1	Tanjungsari	-	783	1.044
2	Cariu	-	-	-
3	Jonggol	1.517	-	1.140
4	Sukamakmur	-	792	1.874
5	Pamijahan	-	-	2.881
6	Leuwiliang	400	319	-
7	Sukajaya	-	-	-
8	Cigudeg	54	315	-
9	Jasinga	1.016	138	-
10	Nanggung	-	-	214
	Jumlah	2.987	2.367	7.153

Realisasi tanam pada tahun 2006 adalah 79.020 Ha dengan IP 100 seluas 13.750 Ha, IP 200 seluas 29.018 Ha, dan IP 300 seluas 36.252 Ha. Sempitnya lahan sawah Kabupaten Bogor disebabkan makin tingginya kebutuhan lahan untuk tempat tinggal serta makin berkembangnya sektor jasa, industri dan perdagangan. Lahan yang terbatas ini dapat dioptimalkan dengan intensifikasi.

Salah satu faktor yang sangat mendukung intensifikasi adalah ketersediaan jaringan irigasi yang sangat diperlukan dalam memanipulasi keterbatasan curah hujan. Jaringan irigasi yang telah ada di Kabupaten Bogor memiliki potensi untuk mengairi sawah seluas 47.121 Ha. Daerah irigasi yang dapat mengairi > 1000 Ha sebanyak 1 Daerah Irigasi (DI), sedangkan 878 lainnya dapat mengairi sawah < 1000 Ha. Dari 879 DI, 237 dalam keadaan baik, 289 dalam keadaan sedang, dan 353 dalam keadaan rusak. Akibat rusaknya 40 % jaringan irigasi, diperkirakan 40 % potensi sawah yang dapat diairi menjadi terbengkalai. Melihat keadaan ini, intensifikasi dapat dilaksanakan dengan baik jika jaringan irigasi diperbaiki

Di Kabupaten Bogor telah berkembang kelembagaan kelompok petani pemakai air (P3A) yang dikenal dengan Mitra Cai serta perangkat struktur "ulu-ulu" dalam pemerintahan Desa yang memiliki tugas dan fungsi mengatur dan menyalurkan air bagi anggota kelompok tani sesuai kebutuhannya. Sampai dengan tahun 2004 terdapat 420 kelompok Mitra Cai yang tersebar di 33 kecamatan. Masalah yang dihadapi kelembagaan Mitra Cai adalah (1) kurangnya semangat gotong royong diantara anggota P3A Mitra Cai, (2) terbatasnya permodalan dalam pemeliharaan jaringan tertier dan kuarter karena luran Petani Pemakai Air tidak berjalan, (3) pencemaran lingkungan masih cukup tinggi sehingga kerusakan saluran semakin cepat, (4) belum tertatanya sistem pengaturan pemakaian air karena rendahnya sikap, pengetahuan dan keterampilan petani dalam pengelolaan air untuk budidaya padi sehingga masih banyak yang beranggapan semakin banyak air pertumbuhan air semakin baik. Oleh karena itu masih perlu diperbaiki dan di tata ulang kelembagaan P3A Mitra Cai agar dapat berfungsi dalam peningkatan produksi dan produktivitas padi.

Dukungan kebijakan, program dan kegiatan di Kabupaten Bogor yang telah dilakukan dalam pengembangan infrastruktur lahan dan air adalah perbaikan jaringan irigasi pedesaan, jaringan irigasi tingkat usaha tani melalui Dana Alokasi Khusus, Tugas Pembantuan, APBD Propinsi, APBD Kabupaten, dan Swadaya Masyarakat. Kegiatan yang didanai dari DAK, Tugas Pembantuan dan APBD Propinsi berupa padat karya dalam perbaikan jaringan irigasi pedesaan dan jaringan irigasi tingkat usaha tani. Sedangkan kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Bogor digunakan untuk rehabilitasi dan peningkatan fungsi jaringan irigasi, Perbaikan JITUT/JIDES, Pembangunan saluran Irigasi, pembangunan drainase, rehabilitasi setu, normalisasi saluran daerah irigasi, pembangunan bendung, pembuatan tanggul saluran, pembangunan bangunan pelimpah, pembuatan cek dam dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya air.

Dukungan kebijakan, program dan kegiatan di Kabupaten Bogor yang dibutuhkan dalam pengembangan infrastruktur lahan dan air adalah perbaikan jaringan irigasi secara terpadu mulai dari saluran primer hingga saluran kuarter (jaringan irigasi pedesaan dan jaringan irigasi tingkat usaha tani).

Dalam persiapan tanam padi, di samping menggunakan alat mesin pertanian (hand tractor), petani di kabupaten Bogor masih menggunakan ternak untuk pengolahan lahan. Pada beberapa wilayah dengan topografi berbukit, petani justru enggan menggunakan hand traktor dan lebih menyukai ternak kerbau, karena dengan hand-traktor petani memerlukan tambahan tenaga untuk memindahkannya dari satu lokasi ke lokasi lainnya serta biaya untuk mengoperasikannya.

Sampai tahun 2005, hand traktor yang ada di tingkat petani sebanyak 334 unit dan terdapat 150 unit tambahan traktor pada tahun 2006. Berdasarkan analisis kebutuhan,

untuk meningkatkan efisiensi dan produktifitas usahatani padi, *hand tractor* yang diperlukan sebanyak 2.031 unit, sehingga dari jumlah yang ada saat ini masih terdapat kekurangan sebanyak 1.547 unit.

Kondisi di atas menyebabkan belum berkembangnya kelembagaan usaha pelayanan jasa alsintan (UPJA) di Kabupaten Bogor. Sampai tahun 2005 di Kabupaten Bogor terdapat 22 UPJA yang tersebar di 11 Kecamatan, yaitu Pamijahan 2 kelompok, Tenjo 1 kelompok, Parung panjang 1 kelompok, Cariu 3 kelompok, Cigudeg 1 kelompok, Cijeruk 1 kelompok, Jonggol 9 kelompok, Jasinga 1 kelompok, Sukamakmur 1 kelompok, Nanggung 1 kelompok dan Leuwiliang 1 kelompok

Dukungan kebijakan, program dan kegiatan di Kabupaten Bogor yang telah dilakukan dalam pengembangan kelembagaan UPJA, sarana dan prasarana pengolahan lahan dan air adalah meningkatkan mekanisasi melalui bantuan alsintan yang bersumber dari APBN maupun APBD Kabupaten, bantuan uang muka alsintan bersumber dari APBN, pendidikan dan pelatihan penggunaan alsintan dan pelatihan perbengkelan yang bersumber dari APBD Kabupaten. Agar pengembangan UPJA dapat optimal perlu dibarengi dengan upaya perbaikan jaringan irigasi agar dapat terwujud waktu tanam yang serempak sehingga peningkatan produksi dapat tercapai.

**Tabel 6. Kelembagaan UPJA dan Alsintan Pengolahan Lahan dan Air di Kabupaten Bogor Menurut Sumber Bantuan UPJA dan UPTD Tahun 2005**

NO	Kecamatan /Nama UPJA	Hand Tractor	Pompa Air
<i>UPTD Wil. Barat</i>			
1.	Kec. Pamijahan		
	- Sukatani	1	1
	- Mina Mandiri	2	1
2.	Kec. Tenjo, Sukahati	1	1
3.	Kec. Parung Panjang, Rabak	1	3
4.	Kec. Cigudeg, Laksana	1	1
5.	Kec. Cibungbulang, Sukatani	1	1
6.	Kec. Cijeruk, Silih Asih	1	1
7.	Kec. Jasinga, Tani Bahagia	2	3
8.	Kec. Nanggung, Mitratani	3	7
<i>UPTD Wil. Timur</i>			
9.	Kec. Cariu		
	- Mitratani	1	6
	- Buanatani	1	8
	- Mitratani	2	-
	- Malaka	2	-
	- Tunas Mekar	-	-
	- Maju	4	0

NO	Kecamatan /Nama UPJA	Hand Tractor	Pompa Air
<b><i>UPTD Wil. Barat</i></b>			
10	Kec. Jonggol		
	- Mekarsari	1	-
	- Silih Asih	1	-
	- Sukaluyu	-	-
11	Kec. Sukamakmur, Mekarjaya	2	5
<b>II UPJA PMI</b>			
<b><i>UPTD Wil. Timur</i></b>			
12	Kec. Jonggol		
	- Sri Rahayu	1	-
	- Citapen	1	-
	- Pusakatani	1	1
	- Sauyunan	1	-
	- Muarajaya	1	-
	- Kramat Jaya	-	-
<b><i>UPTD Wil. Barat</i></b>			
13	Kec. Pamijahan, Asmarajaya	1	-
14	Kec. Leuwiliang, Sawah Lega	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>33</b>	<b>39</b>

#### **b. Perbenihan**

Penggunaan benih unggul bermutu di Kabupaten Bogor masih sekitar 60.49 % dan didominasi oleh varietas Ciherang, Bondoyudo, Batang Gadis, dan Gilirang. Selain menggunakan benih yang dihasilkan sendiri oleh petani, benih biasanya diperoleh dari kios saprodi yang juga menjual sarana produksi dan alat pertanian lainnya. Penggunaan varietas unggul bermutu masih rendah karena tidak tersedianya benih VUB di pasar saat musim tanam. Hal ini disebabkan masih terbatasnya keberadaan penangkar benih di Kabupaten Bogor.

Sampai dengan tahun 2006 terdapat 5 petani penangkar padi dengan total luasan kebun benih 35 Ha. Dalam satu musim tanam, petani penangkar dapat menghasilkan sekitar 140 ton benih, padahal kebutuhan bibit setiap musim tanam rata-rata 987,75 ton. Data potensi penangkar benih padi di Kabupaten Bogor sampai dengan tahun 2006 dapat dilihat pada Tabel 7.

**Tabel 7. Data Potensi Petani/Kelompok Penangkar Benih Padi Kabupaten Bogor Tahun 2006**

No	Nama Penangkar/ Kelompok	Kecamatan	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)
1	Sukri	Jasinga	5	20
2	H. Jaja	Cibungbulang	10	40
3	H. Jaja	Cigombong	10	40
4	Zulfakar	Leuwiliang	5	20
5	Lamsuni	Cibungbulang	5	20
Total			35	140

Berdasarkan data di atas, sesungguhnya terbuka peluang bagi petani atau kelompok tani untuk mengembangkan usahanya menjadi usaha/kelompok usaha penangkar benih, baik untuk memenuhi kebutuhan benih di Kabupaten Bogor atau Kabupaten wilayah sekitarnya. Namun sampai saat ini masih terdapat kendala yang dihadapi dalam usaha penangkaran benih padi yang ada di Kabupaten Bogor, yaitu keterbatasan modal, pemilihan varietas belum sesuai kebutuhan pasar, keterbatasan lahan/ sempitnya kepemilikan lahan, kendala waktu yang cukup lama untuk proses sertifikasi.

Dukungan kebijakan, program dan kegiatan dalam pengembangan usaha perbenihan di Kabupaten Bogor telah dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah Kabupaten Bogor melalui program Ketahanan Pangan. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah penyediaan benih unggul bermutu, fasilitasi sarana dan prasarana penangkar benih, sertifikasi benih, fasilitasi alat pasca panen, dan perbaikan jaringan irigasi.

Dukungan yang masih diperlukan untuk mencapai peningkatan produksi dan produktivitas adalah bimbingan kepada petani penangkar benih, perbaikan jaringan irigasi tingkat usaha tani dan pedesaan, penyediaan/bantuan alat-alat pasca panen untuk mengurangi processing benih, serta bantuan kepada penyuluh pertanian.

### **c Pupuk dan Pesticida**

Umumnya petani padi di Kabupaten Bogor belum menerapkan teknologi anjuran, terutama pemupukan berimbang, sehingga seringkali dosis yang diberikan melebihi dosis anjuran. Selain tidak efektif dan efisien, pemupukan berlebih menyebabkan terjadi penumpukan hara sehingga tanah menjadi jenuh.

Masalah yang dihadapi dalam penerapan teknologi dan distribusi pupuk adalah ketersediaan pupuk di beberapa wilayah distribusi pupuk tidak kontinyu, sehingga pupuk yang tersedia menjadi tidak tepat jumlahnya pada waktu dibutuhkan, terutama untuk jenis TSP dan

KCI. Selain itu, kendala lain yang dihadapi sebagian besar petani adalah tidak terjangkaunya harga pupuk karena lebih tinggi dari HET. Hal ini terjadi di daerah-daerah yang tidak memiliki kios resmi yang ditunjuk distributor. Beberapa wilayah yang mengalami kelangkaan pupuk adalah Babakan Madang, Cileungsi, Klapanunggal, Sukaraja, Ciseeng, Bojonggede, dan Tajurhalang.

Penggunaan pestisida dalam mengendalikan hama dan penyakit tanaman padi di Kabupaten Bogor merupakan alternatif terakhir bagi petani, karena harga pestisida yang terlalu mahal, sehingga eradikasi, pengendalian mekanik, dan pola pergiliran tanaman menjadi pilihan utama para petani padi.

Di samping usaha perorangan/swasta, usaha pelayanan penyediaan sarana produksi di setiap Kecamatan dilaksanakan oleh Koperasi Tani. Saat ini terdapat 64 kios pengecer/kios resmi pupukKujang di Kabupaten Bogor tersebar di 18 Kecamatan di Kabupaten Bogor, perannya dalam usaha pelayanan penyediaan sarana produksi pupuk dan pestisida masih sangat terbatas dan belum mampu mencukupi kebutuhan .

Dukungan kebijakan, program dan kegiatan di Kabupaten Bogor yang telah dilakukan dalam penyediaan dan distribusi pupuk dan pestisida adalah meningkatkan peran distributor dan pengecernya agar pada saat pupuk diperlukan petani selalu tersedia dalam jumlah yang cukup dan harga yang terjangkau. Menindak tegas distributor atau pengecer nakal yang menimbun pupuk atau menaikkan harga sehingga melebihi harga subsidi atau harga eceran tertinggi.

**Tabel 8. Kelembagaan Kios Saprodi dan Koperasi Penyedia Sarana Produksi Pertanian di Kabupaten Bogor Menurut Kecamatan Tahun 2005**

No	Kecamatan	Kios Saprodi	Koperasi
1	Cariu	10	1
2	Tanjungsari	8	1
3	Jonggol	9	0
4	Sukamakmur	9	0
8	Klapanunggal	9	0
7	Sukaraja	5	0
8	Ciseeng	2	1
9	Parung	8	0
10	Gunung Sindur	4	1
12	Kemang	17	1
13	Rancabungur	2	0
14	Ciawi	12	4
15	Cisarua	10	3

No	Kecamatan	Kios Saprodi	Koperasi
16	Megamendung	10	2
17	Dramaga	0	8
18	Tamansari	0	9
19	Ciampea	4	0
20	Leuwiliang	11	1
21	Leuwisadeng	2	1
22	Nanggung	2	1
23	Rumpin	5	1
24	Cigudeg	5	1
25	Sukajaya	5	0
26	Jasinga	9	1
27	Parung Panjang	10	2
	Total	168	39

*Catatan: Kecamatan lainnya tidak terdata*

#### d. Permodalan

Umumnya kelembagaan pelayanan jasa pembiayaan termasuk lembaga keuangan mikro perdesaan belum optimal, baik keberadaannya maupun pemanfaatannya. Masyarakat masih enggan memanfaatkan fasilitas kredit dari lembaga keuangan, sedangkan koperasi kurang berperan mendukung penyediaan modal usaha. Namun demikian, di Kabupaten Bogor telah terdapat usaha jasa pelayanan jasa koperasi yang menyediakan pinjaman permodalan kepada petani-petani lain, yaitu di Cigombong.



Dukungan kebijakan, program dan kegiatan di Kabupaten Bogor yang telah dilakukan dalam mendukung pengembangan permodalan adalah: BPLM, KKP, pengembangan LKM, Penguatan Modal Usaha Kelompok dan lainnya.

Dukungan kebijakan, program dan kegiatan di Kabupaten Bogor yang dibutuhkan dilakukan dalam pengembangan usaha kelembagaan jasa permodalan dan penguatan modal usaha petani adalah meningkatkan minat investor agar mau membiayai usaha pertanian dengan suku bunga yang terjangkau pelaku usaha pertanian, tanpa persyaratan yang sulit dalam memperoleh pinjaman modal, menumbuhkan jiwa wirausaha para petani subsisten sehingga perguliran modal menjangkau seluruh lapisan masyarakat tani.

## 2.4. Sub Sistem Usaha Pertanian Primer

### a. Pola Penguasaan dan Pengusahaan Lahan

Rasio luas tanam dibandingkan jumlah rumah tangga petani padi di kabupaten Bogor dalam kurun waktu 2005 adalah sebesar 0.33 ha/KK, ini menunjukkan jumlah penguasaan petani terhadap lahan sawah setiap kepala keluarga sebesar 0,33 hektar. Terdapat beberapa pola kerjasama usaha dalam usaha pertanian primer padi yaitu: sistem *ngepak*, sakap, gadai dan sewa.

#### *Padi – Padi – Palawija (Kecamatan Pamijahan dan Leuwiliang)*

Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep
Padi			Padi				Palawija				
MH I			MH II				MK I			MK II	

#### *Padi – Padi – Bera (Kecamatan Nanggung dan Cariu)*

Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep
Padi			Padi				Beras				
MH I			MH II				MK I			MK II	

#### *Padi – Padi – Padi (Kecamatan Jonggol)*

Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep
Padi			Padi				Padi			Padi	
MH I			MH II				MK I			MK II	

#### *Padi – Sayuran – Palawija (Kecamatan Cibungbulan)*

Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep
Padi			Sayuran				Palawija				
MH I			MH II				MK I			MK II	

#### *Padi – Palawija (Kecamatan Cigudeg dan Sukajaya)*

Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep
Padi			Padi				Palawija				
MH I			MH II				MK I			MK II	

Sistem *ngepak* menerapkan pola penggarap berpartisipasi dalam tenaga kerja dari mulai *tandur* (tanam) hingga panen, sedangkan biaya pengolahan lahan, benih, pupuk dan obat-obatan dari pemilik lahan, hasil panen dibagi antara penggarap dan pemilik dengan perbandingan 1 : 5.

Sistem *sakap* (bagi hasil) menerapkan pola penggarap berpartisipasi dalam biaya pengolahan lahan dan tenaga kerja dari mulai *tandur* hingga panen sedangkan benih, pupuk dan obat-obatan dari pemilik lahan, hasil panen dibagi antara penggarap dan pemilik dengan perbandingan 1 : 1.

Sistem *gadai* terjadi bila petani terdesak kebutuhan dan memerlukan uang secara cepat, pembayaran pinjaman dilakukan dengan hasil panennya dan selama pinjamannya belum dilunasi hasil panen menjadi milik pemberi gadai.

Sistem *sewa*, petani menyewa lahan untuk kurun waktu tertentu dengan biaya tertentu dan pemilik lahan tidak mempunyai hak atas hasil panen yang diperoleh. Pada umumnya biaya sewa lahan yang umum di Kabupaten Bogor berkisar antara Rp. 2.500.000 – 4.000.000/ Ha /Tahun.

## **b. Pola Tanam**

Pola-pola tanam yang ada di Kabupaten Bogor diantaranya adalah : Padi-Padi-Palawija, Padi – Padi – Beras, Padi – Padi – Padi, Padi – Sayuran – Padi, Padi – Palawija. Pola tanam Padi-Padi-Palawija banyak diterapkan di Kecamatan Pamijahan, Leuwiliang, Sedangkan pola tanam Padi-Padi-Bera banyak dilakukan di Kecamatan Nanggung dan Cariu. Pola tanam padi-padi-padi banyak dilakukan di Kecamatan Jonggol. Sementara itu pola tanam Padi-Sayuran-Palawija juga banyak dilakukan di Kecamatan Cibungbulang dan pola tanam Padi-Palawija banyak dilakukan di Kecamatan Cigudeg dan Sukajaya.

## **c. Penerapan Teknologi**

Tingkat penerapan teknologi budidaya di tingkat petani masih beragam, tergantung kepada orientasi produksi (*subsisten*, *semi komersial* dan *komersial*), kesuburan tanah, resiko yang dihadapi dan kemampuan petani dalam membeli atau mengakses sarana produksi. Secara umum tingkat penerapan teknologi di tingkat petani di Kabupaten Bogor rata-rata pada posisi menengah.

Pengolahan tanah cukup baik dengan adanya alat mesin pertanian. Pada umumnya, di samping menggunakan alat mesin pertanian (*hand tractor*), petani di kabupaten Bogor masih menggunakan ternak untuk pengolahan lahan, terutama di wilayah dengan topografi berbukit, karena dengan *hand-tractor* diperlukan jalan usaha tani, bahan bakar, pemeliharaan suku cadang dan keterampilan pengoperasian.

Tingkat pemberian pupuk juga sangat beragam, secara umum petani di Kabupaten Bogor masih menerapkan jenis dan dosis pupuk yang belum berdasarkan rekomendasi spesifik lokasi yang sesuai dengan hasil analisis kebutuhan lapang. Petani subsisten biasanya menggunakan pupuk pada takaran sangat rendah. Pemupukan belum berimbang dan menyesuaikan dengan kondisi lahan.

Secara umum gangguan OPT tanaman padi di Kabupaten Bogor relatif terkendali karena penerapan pemberantasan hama dan penyakit cukup baik sehingga tingkat kerusakan yang terjadi umumnya pada tahap yang relatif aman ( $< 10\%$ ).

Dalam budidaya peran petani pria dan wanita terlihat nyata, peran pria dan pemuda tani lebih banyak pada saat pengolahan lahan, pemanenan dan pengangkutan, sedangkan peran wanita tani pada saat penanaman/tandur, penyiangan dan pemanenan. Secara umum tingkat upah tenaga kerja pria dan wanita berbeda, untuk pria sebesar Rp. 20.000,- per setengah hari kerja sedangkan tenaga kerja wanita sebesar Rp. 10.000,- per setengah hari.

Sampai sejauh ini peran PPL dalam proses diseminasi teknologi belum optimal, karena rasio jumlah penyuluh dengan wilayah binaannya terlalu luas. Pembekalan terhadap PPL masih sangat terbatas terutama pada penerapan teknologi bukan kepada teori.

## **2.5. Sub Sistem Agribisnis Hilir**

### **a. Pasca Panen dan Pengolahan Hasil**

Proses penanganan pasca panen padi di Kabupaten Bogor meliputi pasca panen primer dan sekunder. Pasca panen primer adalah proses mempertahankan mutu padi dan menekan tingkat kehilangan hasil, sedangkan pasca panen sekunder adalah proses untuk meningkatkan nilai tambah produk. Pada umumnya pemanenan padi dilakukan dengan menggunakan sabit bergerigi, kemudian dilanjutkan dengan perontokkan secara manual, pengeringan, dan penggilingan.

Rata-rata tingkat kehilangan hasil dalam penanganan pasca panen adalah  $15\%$ , meliputi : panen ( $4\%$ ), perontokan ( $4\%$ ), pengangkutan ( $1\%$ ), pembersihan ( $1\%$ ), pengeringan ( $1\%$ ), penggilingan ( $2\%$ ), dan penyimpanan ( $2\%$ ). Tingkat kehilangan hasil tertinggi terjadi pada proses panen dan perontokan. Kehilangan hasil pada saat perontokan terjadi karena banyak petani masih merontokkan padi secara manual dengan menggunakan alat yang sederhana. Selain itu petani tidak menggunakan tirai sehingga gabah yang dirontokkan banyak tercecer.

Penanganan pasca panen dengan menggunakan alat belum banyak dilaksanakan karena terbatasnya jumlah alat pasca panen. Data alat pasca panen di Kabupaten Bogor dapat dilihat pada Tabel 9.



**Tabel 9. Tingkat Ketersediaan dan Kebutuhan Alat Pasca Panen Padi di Kabupaten Bogor Menurut Jenis Peralatan Tahun 2006.**

No	Alat Pasca Panen (Unit)	Ketersediaan	Kebutuhan	Kekurangan
1.	Perontok			
	- Pedal Thresher	26	2.708	2.682
	- Power Thresher	34	1.625	1.591
2.	Pembersih Gabah	35	-	-
3.	Dryer	16	-	-
4.	Penggilingan Besar	234	-	-
5.	Penggilingan Kecil	502	-	-
6.	Huller	257	-	-
7.	Polisher	250	-	-
8.	Sabit Bergerigi	63.497	812.450	748.953
9.	Terpal	10.000	406.225	396.225

Pasca panen produk padi masih dilakukan untuk menghasilkan beras karena konsumsi beras masih tinggi. Pengolahan menjadi bentuk lain masih terbatas pada pembuatan tepung beras dan panganan sederhana seperti *rangginang* dan *ranginging*. Data kelompok pengolah produk padi dapat dilihat pada Tabel 10.

**Tabel 10. Kelompok/Perorangan Pengolahan Produk Padi Menurut Desa, Jenis Produk Olahan dan Tingkat Produksi Tahun 2006**

No	Kelompok/Perorangan	Desa/Kecamatan	Produk Olahan	Produksi
1.	Neri	Leuwimalang/Cisarua	Putu Mayang	25 kg / minggu
2.	Ana	Leuwimalang/Cisarua	Dapros	15 kg / minggu
3.	Asep	Pabuaran/Bojonggede	Tepung Beras Opak	1500 kg / minggu 200 kg / minggu

Kelembagaan usaha yang bergerak pada kegiatan pasca panen dan pengolahan hasil yaitu Perpadi (2006) dan UPJA / Usaha Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian (1999). Perpadi merupakan kelembagaan usaha yang bergerak pada usaha penggilingan padi dan lebih bersifat sebagai usaha keluarga dan sosial. Sedangkan UPJA merupakan kelembagaan petani yang bergerak dalam menyediakan alat mesin pertanian untuk pasca panen maupun pengolahan hasil. Adapun Kelompok UPJA di Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut :



**Tabel 11. Kelompok UPJA Pasca Panen dan Pengolahan di Kabupaten Bogor Menurut Sumber Bantuan UPJA dan UPTD Tahun 2005**

No	Kecamatan / Nama UPJA	Power Thresher	Dryer	RMU	Polisher
<i>UPTD Wil. Barat</i>					
1.	Kec. Pamijahan				
	- Tumaninah	4	2	1	
	- Mina Mandiri	0	0	1	
3.	Kec. Parung Panjang, Rabak	0	1	0	
4.	Kec. Cigudeg, Laksana	3	0	2	
5.	Kec. Cibungbulang, Sukatani	0	1	0	
6.	Kec. Cijeruk, Silih Asih	1	1	0	
7.	Kec. Jasinga, Tani Bahagia	2	1	1	
8.	Kec. Nanggung, Mitratani	4	2	2	
<i>UPTD Wil. Timur</i>					
9.	Kec. Cariu				
	- Mitratani	5	2	1	
	- Buanatani	2	1	1	
	- Tunas Mekar	0	0	1	
10	Kec. Jonggol				
	- Sukaluyu	0	0	1	
11	Kec. Sukamakmur, Mekarjaya	2	1	0	
<b>II UPJA PMI</b>					
<i>UPTD Wil. Timur</i>					
12	Kec. Jonggol				
	- Kramat Jaya	0	1	0	0
<i>UPTD Wil. Barat</i>					
13	Kec. Pamijahan, Asmarajaya	0	1	0	1
	<b>Total</b>	<b>23</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>1</b>

Permodalan usaha pada kegiatan pasca panen dan pengolahan hasil pada umumnya dilakukan secara swadaya perorangan. Sedangkan permodalan usaha yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Bogor didanai dalam bentuk Bantuan Pinjaman Langsung Masyarakat (BPLM). BPLM diluncurkan kepada masyarakat mulai tahun 2003 dengan sistem perguliran, dan di tahun 2006 namanya berubah menjadi Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK). Kegiatan yang didanai dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun APBN untuk berbagai kegiatan pasca panen dan pengolahan hasil di Kabupaten Bogor tahun 2003-2006 adalah sebagai berikut:



**Tabel 12. Kegiatan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil di Kabupaten Bogor Menurut Sumber Dana, Jenis/Jumlah Alat dan Kecamatan Tahun 2003 – 2006.**

No	Kegiatan	Tahun	Sumber Dana	Alat	Jumlah (unit)	Lokasi (Kec)
1.	PMI	2003	APBN	- Dryer - RMU	1 1	Jonggol
2.	Penanganan Pasca Panen	2004	APBD Kab.	- Timbangan duduk - Mesin jahit karung - Karung kemasan - Moisture tester	2 2 2 2	- Tanjungsari - Pamijahan
3	PMI	2004	APBN	- Dryer - RMU	1 1	Pamijahan
4	Pengamatan kehilangan hasil	2004/ 2005	APBN			Pamijahan
5	Gelar teknologi padi	2005	APBD Prop			
6	Manajemen UPJA	2005	APBD Prop			
7	Sosialisasi mutu beras	2005	APBD Prop			
8	Bantuan alat pasca panen padi	2005	APBD Kab	- Polisher - Sortasi	4 4	- Cijeruk - Caringin - Pamijahan - Cibungbulang
9	Bantuan alat pasca panen padi	2006	APBN	- Polisher - Sortasi	1 1	Leuwiliang

#### **b. Pemasaran**

Rantai pemasaran padi di kabupaten Bogor pada umumnya dari petani selanjutnya dibawa oleh pedagang perantara kepada suplier. Dari suplier dikumpulkan di grosir yang selanjutnya oleh pengecer dijual kepada konsumen. Berkenaan dengan Kabupaten Bogor sampai saat ini belum mampu memenuhi sendiri kebutuhan beras, maka pemenuhan kebutuhan masih perlu dipasok dari daerah lain. Dengan demikian pemasaran produksi padi yang dihasilkan oleh petani di Kabupaten Bogor hanya bersifat lokal dan untuk pemenuhan kebutuhan sendiri (*subsisten*).



Sistem penyimpanan padi berupa lumbung diterapkan di daerah-daerah sentra produksi padi seperti Cariu, Jasinga, Tanjungsari, Cigombong, Pamijahan, Cibungbulang, dan Jasinga. Manfaat lumbung padi saat ini adalah sebagai cadangan pangan saat musim paceklik dan penyimpanan gabah untuk tunda jual.

Pengendalian fluktuasi harga gabah di tingkat petani menunjukkan perubahan yang semakin meningkat, yaitu tahun 2005 sebesar Rp. 1.350/kg, tahun 2006 sebesar Rp. 1.800, sedangkan tahun 2007 sebesar Rp. 2.500/kg. Hal ini menunjukkan cukup efektifnya upaya pemerintah dalam menangani masalah perberasan sebagaimana tertuang dalam Inpres Nomor. 13 Tahun 2005 yang menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk GKP sebesar Rp. 1.730/kg, GKG sebesar Rp. 2.250/kg di tingkat penggilingan serta Rp. 2.280/kg di gudang penyimpanan.

Sekarang ini kelembagaan pemasaran gabah di Kabupaten Bogor belum berjalan dengan baik, karena petani lebih menyenangi menjual gabah secara perorangan kepada tengkulak, walaupun dari sisi harga sering merugikan petani. Akan tetapi hal ini lebih disukai karena menjual kepada tengkulak lebih cepat mendatangkan uang bagi petani tanpa dibebani dengan permasalahan tingginya tingkat kadar air.

Walaupun demikian, Pemerintah sebenarnya telah berupaya agar petani memperoleh harga gabah sesuai dengan HPP yang ditetapkan pemerintah, dengan cara menyalurkan anggaran dari APBN melalui kelompok Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) untuk pembelian gabah petani. Besarnya penyaluran dana kepada kelompok LUEP di Kabupaten Bogor seperti yang ditampilkan pada Tabel 13.

**Tabel 13. Pagu Alokasi Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2007**

No	Tahun	Jumlah LUEP	Pagu (Rp.)
1	2005	5	750.000.000
2	2006	7	100.000.000
3	2007	8	1.125.000.000

Faktor pendukung usaha pemasaran padi di Kabupaten Bogor adalah kelembagaan pelayanan keuangan, pasar dan perusahaan penggilingan padi.



**Tabel 14. Kelembagaan Pendukung Usaha Pemasaran Tani Padi di Kabupaten Bogor Menurut Kecamatan Tahun 2005**

No	Kecamatan	Lembaga Keuangan	Pasar	Penggilingan Padi
1	Cariu	1	1	0
2	Tanjungsari	0	3	0
3	Jonggol	0	0	114
4	Sukamakmur	0	0	60
5	Cileungsi	0	0	9
6	Klapanunggal	0	0	6
7	Sukaraja	0	0	2
8	Babakan Madang	0	0	6
9	Ciseeng	0	1	8
10	Parung	3	1	1
11	Gunung Sindur	1	1	2
12	Kemang	0	1	9
13	Rancabungur	0	0	3
14	Ciawi	1	2	6
15	Cisarua	3	1	13
16	Megamendung	1	3	5
17	Cijeruk	0	0	2
18	Dramaga	1	1	0
19	Ciomas	0	1	12
20	Tamansari	0	2	16
21	Cibungbulang	0	0	25
22	Pamijahan	0	0	31
23	Ciampea	0	0	8
24	Leuwiliang	1	1	3
34	Nanggung	0	2	9
25	Rumpin	0	3	0
26	Cigudeg	1	1	49
27	Sukajaya	0	0	54
28	Jasinga	1	1	33
29	Parung Panjang	3	2	18
30	Tenjo	0	0	15
	<b>Total</b>	<b>17</b>	<b>28</b>	<b>519</b>

Catatan : Kecamatan lain tidak terdata



# III. PROSPEK, POTENSI, ARAH DAN BAGAN PENGEMBANGAN



### 3.1. Prospek

#### a. Peningkatan Luas Panen dan Produktivitas Untuk Memenuhi Kebutuhan Penduduk Lokal

Kondisi saat ini pengembangan agribisnis padi Kabupaten Bogor terutama ditujukan untuk pemenuhan konsumsi beras sebagai makanan pokok penduduk. Kebutuhan konsumsi tersebut masih jauh dapat dipenuhi oleh produksi setara beras yang dihasilkan oleh petani Kabupaten Bogor. Oleh karena itu pengembangan padi di Kabupaten Bogor dalam jangka menengah lebih difokuskan meningkatkan produksi beras untuk konsumsi pangan utama penduduknya dibanding diversifikasi produk untuk pengembangan hasil olahannya.

Dengan rata-rata kenaikan jumlah penduduk setiap tahun sebesar 2 %, diperkirakan jumlah penduduk tahun 2008 sebanyak 4.351.944 orang. Jika diasumsikan kebutuhan beras sebanyak 105,85 kg/kapita/tahun, maka jumlah kebutuhan beras untuk seluruh penduduk Kabupaten Bogor adalah 460.653 ton. Perkiraan produksi beras pada saat itu hanya sekitar 275.716 ton, sehingga mengalami kekurangan beras (bila target swasembada) sebesar 184.937 ton, atau hanya dapat dipenuhi sekitar 59 persen dari kebutuhan (Tabel 15). Dengan demikian Kabupaten Bogor akan memenuhi permintaan beras penduduknya dari luar wilayah Kabupaten Bogor.

**Tabel 15. Perkiraan Permintaan/Kebutuhan Beras Untuk Kabupaten Bogor Tahun 2008 – 2012**

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Perkiraan Jumlah Penduduk (Orang)	4.351.944	4.438.983	4.527.763	4.618.318	4.710.684
2.	Perkiraan Kebutuhan Beras (Ton)	460.653	469.866	479.264	488.849	498.626
3.	Perkiraan Produksi Beras (Ton)	275.716	275.716	275.716	275.716	275.716
4.	Kekurangan (Ton)	184.937	194.150	203.548	213.133	222.910
5.	Rasio Produksi/ Konsumsi (%)	59	58	57	56	55

Dengan asumsi yang sama pada tahun 2009 kebutuhan konsumsi beras Kabupaten Bogor diperkirakan mencapai 469.866 ton. Apabila tidak ada upaya peningkatan produksi padi/beras melalui berbagai kegiatan atau program, maka kekurangan beras akan bertambah besar, yaitu 194.150 ton, atau hanya dapat terpenuhi sekitar 58 persen. Demikian pula

perkiraan kebutuhan dan produksi sampai tahun 2012 mengalami defisit sampai 222.910 ton atau hanya terpenuhi 55 persen dari kebutuhan konsumsinya.

Untuk mengurangi kesenjangan antara kebutuhan konsumsi dan kemampuan produksi beras di Kabupaten Bogor, maka tidak ada jalan lain kecuali harus terus diupayakan peningkatan produksi padi/beras melalui berbagai macam cara, sebagaimana telah diamanatkan dalam rencana pembangunan pertanian Kabupaten Bogor. Sasaran pencapaian produksi/produktivitas padi dapat dilihat pada Tabel 16. Kondisi ini memberikan gambaran umum bahwa prospek pemasaran beras untuk tingkat pasar lokal masih cukup besar.

**Tabel 16. Matrik Sasaran Pencapaian Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi, Produktivitas Padi Kab Bogor Tahun 2008 -2012**

No	Peubah	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Luas Tanam (Ha)	81,243	81,774	83,152	83,647	84,207	84,947
	Hibrida	50	100	200	4,000	8,000	16,000
	Inbrida						
	- PTT	15,500	19,440	23,447	23,766	23,840	19,809
	- PMI (Jabal)	19,950	20,534	20,597	20,369	19,846	19,129
	Reguler	45,743	41,700	38,908	35,512	32,521	30,009
2	Penambahan Luas Tanam Reguler (Ha)	-	531	1,378	495	560	740
3	Luas Panen (Ha)	77,182	79,157	80,491	80,971	81,513	82,229
	Hibrida	48	97	194	3,872	7,744	15,488
	Inbrida						
	- PTT	14,892	18,818	22,697	23,006	23,077	19,175
	- PMI (Jabal)	19,168	19,877	19,938	19,717	19,211	18,517
	Reguler	43,073	40,365	37,663	34,376	31,480	29,049
4	Produktivitas Rata-Rata (Kw/Ha)	58.10	59.42	60.78	62.88	64.96	67.62
	Hibrida	79.00	79.50	80.00	80.50	81.00	81.50
	Inbrida						
	- PTT	61.57	62.80	64.06	65.34	66.65	67.98
	- PMI (Jabal)	58.71	59.88	61.08	62.30	63.55	64.82
	Reguler	56.13	56.97	57.83	58.69	59.57	60.47

No	Peubah	2007	2008	2009	2010	2011	2012
5	Tambahan Produksi dari losses(GKG)	2,046.08	2,379.82	2,687.24	3,043.29	3,386.11	3,766.06
	Hibrida	3.82	7.70	15.49	311.70	627.26	1,262.27
	Inbrida						
	- PTT	916.90	1,181.79	1,453.88	1,503.17	1,537.99	1,303.51
	- PMI (Jabal)	1,125.35	1,190.33	1,217.87	1,228.43	1,220.86	1,200.28
6	Produksi (GKG)	204,607	237,982	268,724	304,329	338,611	376,606
	Hibrida	382	770	1,549	31,170	62,726	126,227
	Inbrida						
	- PTT	91,690	118,179	145,388	150,317	153,799	130,351
	- PMI (Jabal)	112,535	119,033	121,787	122,843	122,086	120,028
	Reguler	241,765	229,963	217,785	201,761	187,538	175,647
7	Produksi Total (Ton)	448,418	470,325	489,196	509,134	529,535	556,019
	Hibrida	386	777	1,564	31,481	63,354	127,489
	Inbrida						
	- PTT	92,607	119,361	146,842	151,820	155,337	131,655
	- PMI (Jabal)	113,660	120,223	123,005	124,071	123,307	121,228
	Reguler	241,765	229,963	217,785	201,761	187,538	175,647
8	Produksi Setara Beras (Ton)	283,400	297,245	309,172	321,773	334,666	351,404
9	Jumlah Penduduk (Orang)	4,266,612	4,351,944	4,438,983	4,527,763	4,618,318	4,710,684
10	Kebutuhan/ Permintaan Beras (Ton)	451,621	460,653	469,866	479,264	488,849	498,626
	Konsumsi:105,85 kg per kapita/tahun						
11	Rasio (%)	62.75	64.53	65.80	67.14	68.46	70.47

**Keterangan :**

Luas panen naik karena perbaikan irigasi  
 Produktivitas PTT dan PMI naik 2 % per tahun  
 Produktivitas reguler naik 1,5 %



## b. Pengembangan Usaha Penangkaran Benih

Berdasarkan keragaan selama lima tahun terakhir antara 2001 – 2005, produksi padi di Kabupaten Bogor cenderung menurun sebesar 1,004 % yang diakibatkan oleh penurunan luas tanam sebesar 2,1 % dan penurunan luas panen sebesar 1,389 %, namun kecenderungan produktivitas meningkat sebesar 0,605 %. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi teknologi petani semakin baik. Di sisi lain tingkat penggunaan benih unggul bermutu di Kabupaten Bogor masih sekitar 30 % karena terbatasnya keberadaan penangkar benih di Kabupaten Bogor. Sampai dengan tahun 2006 baru terdapat 5 petani penangkar padi dengan total luas kebun 35 Ha dan produksi 140 ton benih per musim tanam padahal kebutuhan benih per musim tanam rata-rata 987,75 ton.

Berdasarkan kondisi tersebut, dalam jangka menengah Kabupaten Bogor berprospek untuk menumbuhkembangkan usaha petani penangkar benih padi untuk memenuhi kebutuhan lokal dan secara bertahap dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan wilayah sekitarnya di Jawa Barat.

Dari beberapa contoh pola tanam, yang dominan dilakukan oleh petani lahan sawah Kabupaten Bogor, dapat dilihat gambaran analisis usahatani padi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Hal ini dapat dilihat dari analisis Benefit Cost Ratio (BCR) pada masing-masing tipe pola tanam. Walaupun analisis usahatani yang ditampilkan belum mewakili secara keseluruhan usahatani lahan sawah di Kabupaten Bogor, tetapi sebagai gambaran umum ketiga tipe pola tanam, yaitu tipe 1, 4 dan 5 memiliki nilai B/C yang relatif sama, sedangkan tipe 2 adalah yang paling menguntungkan dan tipe 3 yang kurang menguntungkan.

**Tabel 17. Luas Lahan dan Pola Tanam Responden di Lahan Sawah Kabupaten Bogor Tahun 2007**

Pola tanam	Contoh Luas garapan (ha)	Tipe		
		MK I	MK II	MK III
1	0,9	Padi	-	-
2	1,0	Padi	Ubi jalar	-
3	0,7	Padi	Ubi jalar	Sayuran
4	0,7	Padi	Sayuran	Sayuran
5	1,0	Padi	Padi	Ubi jalar



**Tabel 18. Analisis Usaha Tani per Hektar Lahan Sawah di Kabupaten Bogor**

Tipe	Biaya (Rp. 1.000)				Penerimaan (Rp 1000)	Keuntungan (Rp 1000)	B/C
	MK I	MK II	MK III	Jumlah			
1	2.574	-	-	2.574	6.667	4.092	1,59
2	2.405	2.475	-	4.880	13.520	8.640	1,77
3	4.869	1.384	3.441	9.694	19.100	9.406	0,97
4	2.263	4.255	3.506	10.023	25.714	15.691	1,56
5	3.356	3.206	2.189	8.751	22.000	13.248	1,51

Kabupaten Bogor yang memiliki agroekosistem dataran menengah yang relatif basah dan banyak memiliki sumber air juga sangat berprospek untuk mendukung usaha penangkaran benih karena dapat memproduksi benih di setiap musim tanam.

Prospek pengembangan usaha penangkaran benih di Kabupaten Bogor juga terbuka karena didukung oleh berbagai lembaga penelitian pemerintah dan usaha produksi benih swasta di sekitar wilayah Kabupaten Bogor. Disamping itu keberadaan lembaga pendidikan tinggi pertanian sangat terbuka untuk dilibatkan dalam penelitian dan pendampingan terhadap pengembangan usaha penangkaran benih.

### **c. Pengembangan Usaha Industri Pasca Panen, Pemasaran dan Pengolahan Produk Beras**

Dalam jangka panjang petani di Kabupaten Bogor secara bertahap dapat diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap produk beras berkualitas menengah dan tinggi. Hal ini juga didukung oleh letak Kabupaten Bogor yang berada di tengah-tengah jalur Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, Cianjur dan Sukabumi sehingga memberikan kemudahan dalam aksesibilitas perekonomian dan pasar potensial. Disamping itu usaha pemasaran beras lokal juga dapat dikembangkan, tidak hanya mendatangkan beras produksi dari wilayah sekitarnya seperti Sukabumi, Cianjur, Karawang maupun dari wilayah Propinsi Banten.

Usaha-usaha penanganan pasca panen, pengemasan dan pengolahan produk bahan pangan olahan berbasis beras sangat terbuka untuk dikembangkan di Kabupaten Bogor melalui pengembangan kelembagaan pemasaran gabah. Petani yang menjual gabah secara perorangan langsung kepada tengkulak dapat diarahkan untuk membentuk usaha kelompok pemasaran beras atau mengembangkan usaha kemitraan dengan swasta.



## 3.2. Potensi Pengembangan

Terdapat proses pengembangan agribisnis padi di Kabupaten Bogor yaitu untuk 1) peningkatan luas panen dan produktivitas untuk memenuhi kebutuhan penduduk lokal, 2) pengembangan usaha penangkaran benih dan 3) pengembangan usaha industri pemasaran dan pengolahan produk beras. Namun demikian prospek tersebut tidak akan dapat diwujudkan tanpa melihat potensi sosial ekonomi petani sebagai pelaku utama. Diperlukan upaya khusus untuk memahami permasalahan dan harapan petani sebagai pelaku utama agribisnis padi Kabupaten Bogor.

### a. Peningkatan Luas Panen dan Produktivitas Melalui Panataan Pengelolaan Lahan dan Air

Sumber daya alam yang tersedia, khususnya air belum dimanfaatkan secara optimal karena kerusakan akibat kebocoran saluran irigasi tidak semuanya dapat diperbaiki oleh petani secara swadaya. Kemampuan swadaya masyarakat saat ini masih terbatas karena keterbatasan ekonomi keluarga. Ketersediaan tenaga kerja di Kabupaten Bogor melebihi kebutuhan tenaga yang diperlukan di sektor pertanian, sehingga sebagian dari mereka mencari pekerjaan di luar desa tempat tinggalnya. Karena dekatnya wilayah ini dengan pusat pertumbuhan, baik ibu kota kabupaten, kota besar bahkan dengan Ibu Kota Jakarta, maka tenaga kerja yang mempunyai sedikit keterampilan saja diluar sektor pertanian (misalnya menjadi buruh bangunan atau pertukangan) akan mencari usaha di luar desa.

Upaya untuk mengatasi kerusakan jaringan irigasi adalah melalui perbaikan, baik saluran, bangunan kelengkapannya dan bendung irigasi. Dengan perbaikan jaringan irigasi, akan meningkatkan ketersediaan air irigasi di lahan sawah, sehingga berdampak langsung pada meningkatnya lahan sawah yang dapat ditanami padi.

Perbaikan jaringan irigasi juga diharapkan dapat menghindarkan adanya konflik pemakaian atau alokasi air irigasi diantara petani yang sering terjadi selama ini. Disamping itu, petani akan mempunyai lebih banyak peluang untuk memelihara ikan di *empang*, serta melaksanakan tanam legowo yang dikombinasikan dengan ikan dalam sistem *mina padi*. Bahkan selama ini dipercaya lahan bekas tanaman ubi jalar yang banyak diusahakan di kabupaten Bogor ternyata sangat bagus kalau dilanjutkan dengan sistem *mina padi*. Kombinasi usaha seperti ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan petani yang memperoleh dampak dari upaya perbaikan saluran irigasi.

Untuk mewujudkan kelestarian sumber daya lahan dan air dalam pengembangan agribisnis padi di kabupaten Bogor, maka pendayagunaan potensi seyogyanya dilakukan dengan melakukan pengendalian dan pemanfaatan sumber daya lahan dan air yang ramah lingkungan diantaranya yaitu pengelolaan mendukung pertanian lahan abadi dan penggunaan teknologi hemat air.

**b. Peningkatan Produksi, Pengembangan Usaha dan Kesejahteraan Petani Melalui Pengembangan Kelembagaan Kelompok Tani**

Pengembangan aspek kelembagaan dalam berkelompok sangat dirasakan oleh petani di Kabupaten Bogor. Upaya yang dipandang petani mampu memperbaiki kelembagaan kelompok tani adalah: penataan perencanaan, pertemuan rutin, peningkatan kesadaran anggota, penetapan tujuan yang jelas dalam berkelompok serta penataan tertib administrasi kelompok.

Kelompok tani yang kuat menjadi syarat utama keberhasilan program pertanian di pedesaan, karena petani secara individu hampir dipastikan tidak mampu menolong diri mereka sendiri, kecuali dengan berkelompok. Upaya memobilisasi kelompok tani ini merupakan usaha untuk memberdayakan mereka dalam mengembangkan agribisnis padi di Kabupaten Bogor.

**c. Peningkatan Produksi, Pengembangan Usaha dan Kesejahteraan Petani Melalui Pengembangan Permodalan Usaha**

Petani menganggap aspek permodalan sebagai hambatan dalam pengembangan kelembagaan kelompok usaha agribisnis padi. Upaya pembinaan dan fasilitasi yang diharapkan petani untuk mengatasi masalah permodalan adalah: penumbuhan iuran anggota, simpanan pada saat panen, penjualan hasil panen melalui kelompok, pengembangan usaha kelompok serta pengembangan unit usaha simpan pinjam.

Upaya pembinaan dan fasilitasi pemerintah dalam pengembangan agribisnis padi melalui pengembangan permodalan usaha seyogyanya memperhatikan harapan dan permasalahan yang dihadapi petani dalam mensiasati belum terbukanya akses terhadap sumber permodalan yang tersedia.

**d. Peningkatan Nilai Tambah dan Pengembangan Produk Usaha Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran**

Peningkatan nilai tambah melalui kegiatan pasca panen padi di Kabupaten Bogor terutama harus secara khusus dilakukan pada aspek pengeringan dan pengurangan kehilangan hasil. Sudah merupakan gejala umum dan juga merupakan hasil kajian, bahwa kehilangan hasil padi di lahan sawah cukup tinggi. Diperkirakan kehilangan hasil padi dari kegiatan panen, perontokan, pengangkutan dan pengeringan bisa mencapai rata-rata sampai 15 persen dari total produksi. Hal ini diakibatkan oleh ketidak-tahuan dan kurang perhatiannya petani di samping kurangnya alat-alat yang dapat digunakan untuk mengurangi kehilangan hasil. Upaya praktis yang dapat dalam menekan kehilangan hasil adalah pada saat panen dan perontokan.



### 3.3. Arah Pengembangan

Berdasarkan prospek dan potensi pengembangan agribisnis padi di atas, maka arah pengembangan padi di Kabupaten Bogor baik untuk: (1) memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk lokal, (2) pengembangan usaha penangkaran benih dan (3) pengembangan usaha industri pemasaran dan pengolahan produk beras, maka arah pengembangan yang dapat diacu bagi segenap pelaku agribisnis padi, terutama Pemerintah dan Pemerintah Daerah adalah melalui upaya pemanfaatan potensi yang ada secara maksimal.

#### a. Peningkatan Luas Panen dan Produktivitas

Diperlukan upaya untuk memperbaiki pengelolaan lahan yang dilakukan oleh petani di Kabupaten Bogor melalui diseminasi teknologi pengelolaan lahan. Dibandingkan dengan potensi lahan sawahnya, produktivitas hasil padi di Kabupaten Bogor masih dapat ditingkatkan. Penyebab rendahnya produktivitas hasil padi adalah : (1) serangan hama dan penyakit yang tinggi; (2) mutu benih yang rendah, (3) pemupukan yang belum optimal dan (4) tingginya kehilangan hasil ini terutama dari kegiatan panen, perontokan dan pengeringan

Untuk mengembangkan usahatani padi sawah, yang menjadi kendala utama budidaya padi adalah ketersediaan air irigasi. Apabila air irigasi tersedia sesuai dengan kebutuhan pola tanam petani, maka pengembangan padi sawah secara teknis mudah dilakukan, tetapi bila ketersediaan air irigasi pada lahan sawah petani kurang tersedia atau tidak tersedia, maka budidaya padi sawah akan mengalami kegagalan atau hambatan. Oleh karena itu dalam analisa pengembangan padi sawah harus memperhatikan ketersediaan air irigasi secara keseluruhan dan kontinyu.

Berkurangnya air irigasi disebabkan oleh sumber air irigasi berkurang, kerusakan jaringan irigasi, dan pengelolaan jaringan irigasi yang belum optimal. Pengelolaan jaringan irigasi yang kurang optimal itu adalah kurangnya pemeliharaan jaringan irigasi dan pembagian air irigasi yang belum adil. Dua hal yang mengakibatkan kurang tersediannya air irigasi di lahan sawah, (1) menyebabkan berkurangnya luas areal tanam/luas areal panen Padi dan (2) menurunkan produktivitas padi lahan sawah.

#### b. Pengembangan Kelembagaan Kelompok Tani

Dalam upaya memenuhi kebutuhan konsumsi dan pengembangan kelompok usaha penangkar benih, maka diperlukan pengembangan kelembagaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani dengan melakukan penataan terhadap institusi pembinaan, terutama kelembagaan penyuluhan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.



### c. Pengembangan Permodalan Usaha

Pengembangan permodalan usaha seyogyanya tidak semata-mata diarahkan pada penyediaan skim kredit dan bantuan cuma-cuma bagi petani, akan tetapi terutama lebih diarahkan pada peningkatan keswadayaan masyarakat untuk memperkuat permodalan usaha serta mengembangkan usaha kemitraan dengan usaha swasta.

### d. Pengembangan Usaha Pasca Panen, Pemasaran dan Pengolahan

Permasalahan pasca panen lebih bersumber dari petani sebagai pelaku usaha dibanding bersumber dari faktor lainnya. Pengaruh iklim dapat disiasati dengan teknologi yang tersedia. Dengan demikian pengembangan usaha pasca panen seyogyanya lebih dilakukan dengan gerakan penyadaran, di samping fasilitasi teknologi pasca panen yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.



### 3.4 Matrik bagan road map

G O A L	Rasio Permintaan-Kebutuhan (%)	64,53	65,80	67,14	68,46	70,47
	Produksi (ton)	470.325	489.196	509.134	529.535	556.019
L	Produktivitas (ku/ha)	59,42	60,78	62,88	64,96	67,62
	T a h u n	2008	2009	2010	2011	2012
<b>I. Peningkatan Produksi &amp; Produktifitas</b>						
1. Benih						
- Penggunaan benih unggul (ton)						
* Hibrida						
	2	3	60	120	240	
* Inbrida						
	2.042	2.072	1.991	1.905	1.724	
2. Pengelolaan lahan/percepatan tanam						
- Pengadaan hand traktor (unit)						
	240	480	720	960	1.199	
3. Ketersediaan air (Ha)						
- Pemetaan Irigasi (DI)						
	400	200	200	79	-	
- Perbaikan jaringan irigasi (JITUT/JIDES) (Ha)						
	1.803	3.497	5.327	7.192	8.992	
4. Panen						
- Pengadaan sabit bergerigi (unit)						
	151.759	303.518	455.277	607.036	758.795	
5. Pasca Panen/Pengurangan Losses						
- Pengadaan pedal thresher (unit)						
	543	1.086	1.629	2.172	2.715	
- Pengadaan RMU (unit)						
	93	186	279	372	464	
- Pegadaan banting bertirai (unit)						
	3.290	3.289	3.289	3.289	3.289	
6. Penerapan PTT (kelompok)						
	50	100	150	200	250	
<b>II. Pemenuhan Kebutuhan Benih</b>						
1. Pengmb penangkaran Benih (kelompok)						
	5	10	15	20	25	
<b>III. Pengembangan Usaha Pemasaran</b>						
1. Penyimpanan						
- Pembuatan gudang (m2)						
	2.000	4.000	6.000	8.000	10.000	
2. Pemasaran						
- Kemitraan (kelompok)						
		5	10	15	20	
<b>TAHUN</b>		<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2020</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>

Pasar/Pengguna P	roduktivitas Padi (Ku/Ha)					<b>Manfaat:</b>
	59.42	60.78	62.88	64.96	67.62	Produktivitas Naik ( 2-4 % /Th), Penggunaan Benih Produksi Lokal (70 %), Tumbuhnya kelompok rintisan pemasaran beras berkualitas
<b>Adopsi dan Pemasyarakatan Teknologi</b>	Penambahan luas tanam PTT dan PMI padi Peningkatan PTT dan PMI padi di sawah irigasi Penggunaan benih unggul hasil produksi penangkar lokal Peningkatan ketersediaan benih, Pemantapan pembinaan kelompok tani					<b>Hasil:</b> Luas tanam padi hibrida 16.000 Ha, inbrida 38.938 Ha, reguler 30.009 Ha
<b>Pengembangan</b>	Peningkatan teknologi penangkaran benih unggul Penerapan dan pengembangan PTT dan PMI					<b>Keluaran:</b> Berkembangnya organisasi kelompok penangkar benih (25 Kelompok) Berkembangnya agribisnis padi di 10 wilayah sentra produksi
	Peningkatan pengelolaan panen dan pasca panen Peningkatan pengelolaan lahan dan percepatan tanam Peningkatan ketersediaan air/irigasi (JITUT/JIDES) Pemantapan pembinaan kelompok penangkaran benih Pengelolaan dan karakteristik sumberdaya (lahan, air, SDM, modal)					<b>Keluaran :</b> Memasyarakatnya penggunaan sabit bergerigi, banting bertirai, pedal thresher, berkembangnya RMU, gudang Terpeliharanya jaringan irigasi, meningkatnya IP, penambahan luas tanam, meningkatnya kualitas produksi benih
<b>Sumberdaya</b>						
<b>Tahun 2</b>	<b>008</b>	<b>2009 2</b>	<b>010</b>	<b>2011 2</b>	<b>012</b>	

**Gambar 7. Matrik Bagan Roadmap Pengembangan Padi Kabupaten Bogor**

# IV. TUJUAN DAN SASARAN



#### 4.1. Tujuan

Berdasarkan keragaan kondisi saat ini serta prospek, potensi dan arah pengembangan, maka ditetapkan tujuan pengembangan produksi padi di Kabupaten Bogor adalah :

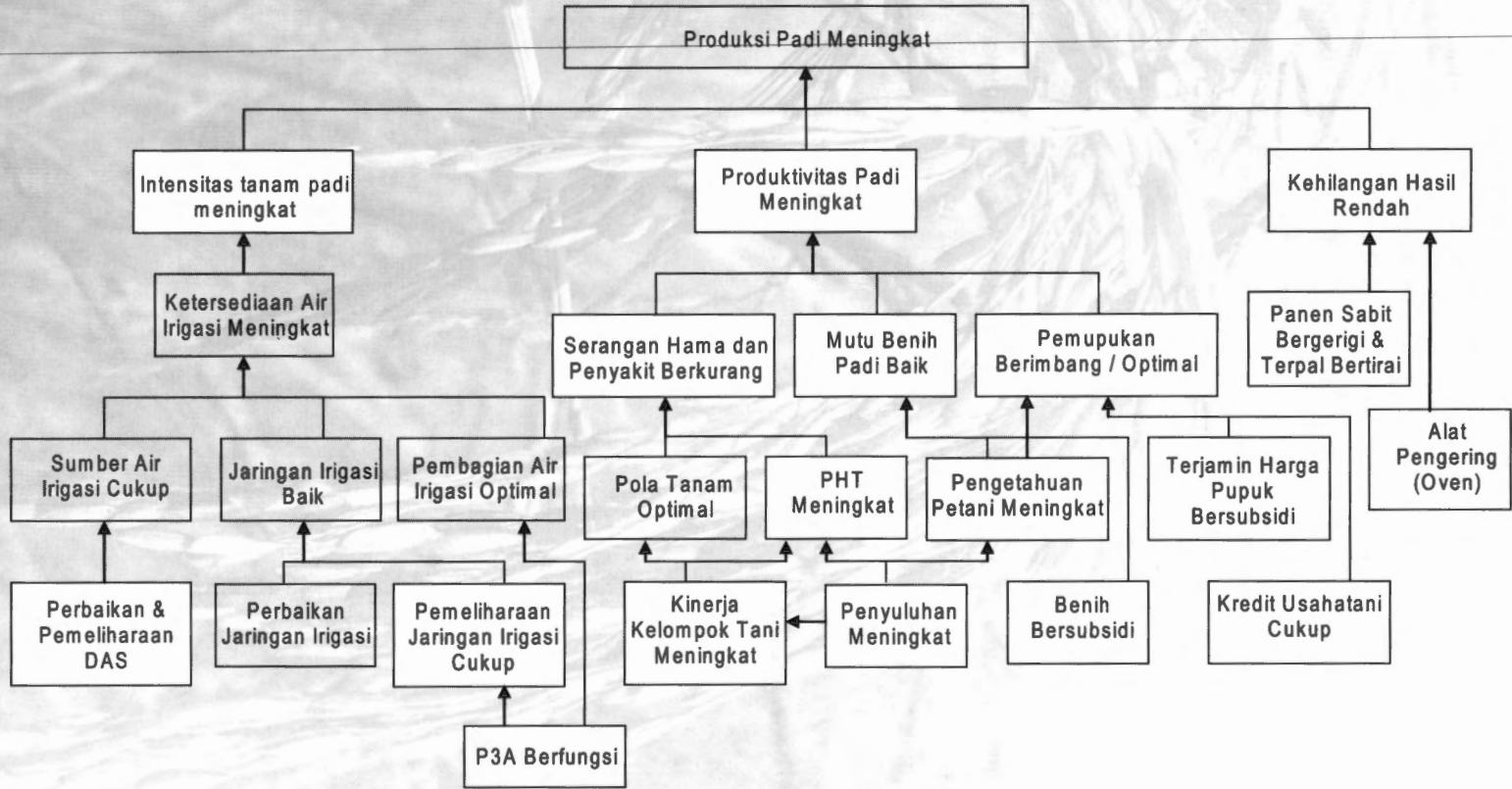
1. Untuk memenuhi kebutuhan beras sendiri yang terus meningkat, baik sebagai bahan baku industri maupun bahan pangan. Target pemenuhan kebutuhan adalah 70,47 % pada tahun 2012 dengan tingkat produksi mencapai 556.019 ton dan produktivitas 67,62 ku/Ha. Selain itu dapat dicapai peningkatan pendapatan petani melalui peningkatan efisiensi produksi dan peningkatan nilai tambah.
2. Memenuhi kebutuhan benih untuk petani di Kabupaten Bogor serta untuk memenuhi kebutuhan sentra produksi di wilayah sekitarnya melalui pengembangan usaha penangkaran benih.
3. Mengembangkan usaha pemasaran beras dan industri olahan produk pangan berbasis beras.

#### 4.2. Sasaran

Untuk mencapai tujuan tersebut sasaran peningkatan produksi padi periode 2007 – 2012 dihitung berdasarkan proyeksi permintaan beras dengan memperhitungkan pertumbuhan penduduk, elastisitas pendapatan dan harga. Dengan menggunakan tingkat konversi beras sebesar 63,2% dan konsumsi 105,85 kg per kapita per tahun maka untuk memenuhi kebutuhan beras diperlukan gabah sebanyak 448.418 ton pada tahun 2007, 470.325 ton pada tahun 2008, 489.196 ton pada tahun 2009, 509.134 ton pada tahun 2010, 529.535 ton pada tahun 2011 dan 556.019 ton pada tahun 2012.

##### a. Sasaran Jangka Menengah (5 tahun)

Dalam kurun waktu 5 tahun (2008-2012) sasaran yang akan dicapai untuk memenuhi kebutuhan beras adalah peningkatan produksi padi menjadi 556.019 ton GKP. Untuk mencapai kuantitas tersebut diharapkan terjadi peningkatan produktivitas secara bertahap dari 2 % hingga 4 % sehingga pada tahun 2012 produktivitas mencapai 67,62 ku/Ha. Sementara itu luas panen terus dipertahankan bahkan ditingkatkan hingga pada tahun 2012 dapat mencapai 82.229 Ha (naik sebesar 6,54 % dari tahun 2007) yang setara dengan 84.947 Ha luas tanam. Pencapaian sasaran ini akan dicapai melalui penggunaan benih unggul (hibrida dan inbrida), penerapan PTT dan PMI, pengelolaan/percepatan tanam, penyediaan air, dan pengelolaan pasca panen. Melalui penanganan pasca panen diharapkan kehilangan hasil dapat ditekan menjadi 4 %. Tujuan dan sasaran agribisnis padi, khususnya peningkatan produksi Kabupaten Bogor dapat dilihat pada Gambar 8.



Gambar 8. Pohon Tujuan Peningkatan Produksi Padi

Sasaran lain yang akan dicapai tahun 2012 adalah pemenuhan kebutuhan benih dari petani penangkar. Pada tahun 2008 akan dibina 5 petani penangkar dan meningkat secara bertahap menjadi 25 kelompok penangkar pada tahun 2012. Dengan 25 kelompok ini diharapkan pemakaian benih bersertifikat dapat meningkat menjadi 70 %.

Sasaran 5 tahun yang akan dicapai dalam pengembangan usaha pemasaran beras yaitu pembuatan gudang-gudang penyimpanan agar petani dapat melakukan tunda jual. Dengan cara ini petani dapat mengatur pemasaran produknya untuk mendapatkan harga yang optimal. Selain itu diupayakan juga kemitraan kelompok tani dengan pengusaha agar petani mendapat jaminan pasar.

#### **b. Sasaran Jangka Panjang (20 tahun)**

Dalam jangka panjang (20 tahun) Kabupaten Bogor akan mengembangkan usaha pemasaran beras berkualitas dan industri produk olahan pangan berbasis beras. Sasaran pengembangan padi pada masa yang akan datang diarahkan pada perbaikan mutu produk beras menjadi bahan pangan pokok dan pangan fungsional seperti beras kepala, beras giling, beras organik, beras aromatik, beras instan, beras kristal, beras beryodium, beras IG rendah, beras nutrisi tinggi dan beras Fe tinggi.





V. STRATEGI, KEBIJAKAN,  
PROGRAM DAN  
KEGIATAN



## 5.1. Strategi

Berdasarkan keragaan kondisi saat ini, prospek, potensi dan arah pengembangan, tujuan dan sasaran pengembangan agribisnis padi Kabupaten, maka dapat dirumuskan strategi sebagai berikut:

- Strategi optimalisasi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur, sarana dan prasarana produksi serta penerapan teknologi budidaya padi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk lokal pada tahun 2012 sebesar 70,47 % melalui peningkatan produktivitas padi menjadi 67,62 ku/Ha, peningkatan luas panen menjadi 82.229 Ha, serta peningkatan produksi menjadi 556.019 ton GKP. Strategi ini akan difokuskan pada optimalisasi jaringan irigasi, penyediaan benih, pupuk, alsintan serta optimalisasi penerapan teknologi.
- Strategi pemberdayaan kelembagaan tani penangkar benih padi untuk memenuhi kebutuhan benih bersertifikat sebesar 70 % pada tahun 2012. Sasaran yang akan dicapai yaitu meningkatnya kapasitas dan jumlah kelembagaan penangkar benih padi menjadi 25 kelompok pada tahun 2012. Strategi ini akan difokuskan pada peningkatan kemampuan kelembagaan petani penangkar benih.
- Strategi optimalisasi prasarana usaha dan kemitraan usaha sebagai strategi jangka panjang (20 tahun) untuk mengembangkan usaha industri pemasaran dan pengolahan produk beras. Strategi ini akan difokuskan pada pembuatan gudang penyimpanan dan membangun kemitraan usaha di bidang pemasaran.

## 5.2. Kebijakan

Kebijakan yang ditetapkan untuk mewujudkan strategi yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut:

- Kebijakan peningkatan produksi, produktivitas dan penganekaragaman pangan melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur, sarana dan prasarana produksi serta teknologi budidaya padi.
- Kebijakan optimalisasi kelembagaan penangkar benih padi melalui peningkatan pembinaan dan pengembangan kapasitas kelompok tani penangkar benih dari aspek teknologi budidaya hingga pemasaran benih serta manajemen organisasi asosiasi penangkar benih.
- Kebijakan pengembangan industri kecil pasca panen, pengolahan dan pemasaran beras di pedesaan guna meningkatkan nilai tambah dan pendapatan petani melalui optimalisasi pemanfaatan prasarana usaha dan kemitraan usaha industri pedesaan.



### 5.3. Program

Kebijakan di atas tersebut dijabarkan ke dalam program pembangunan Departemen Pertanian, yaitu Program Peningkatan Ketahanan Pangan, Program Pengembangan Agribisnis dan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.

Adapun untuk program pembangunan Kabupaten Bogor, kebijakan di atas diwujudkan dan dirumuskan ke dalam Program Peningkatan Kesejahteraan petani, Program Peningkatan Ketahanan Pangan, Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian dan Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian.

### 5.4. Kegiatan

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebagai operasionalisasi dari program pembangunan Departemen Pertanian adalah sebagai berikut:

- Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung program **Peningkatan Ketahanan Pangan** yaitu : pembuatan/rehabilitasi JIUT/JIDES, pengembangan intensifikasi tanaman padi, peningkatan mutu pasca panen padi, pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian tepat guna, penyediaan sarana produksi pertanian, pengembangan penangkaran benih padi, sertifikasi bibit unggul, pengembangan lumbung pangan, pengendalian hama terpadu serta pengembangan sekolah lapang pengendalian hama terpadu.
- Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program **Pengembangan Agribisnis** yaitu : pelatihan petani dan pelaku agribisnis, penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis, pembuatan demplot serta penilaian kelas kelompok tani.
- Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program **Peningkatan Kesejahteraan Petani** yaitu : pembangunan pusat-pusat etalase/eksebis/promosi atas hasil produksi pertanian, promosi atas hasil produksi pertanian daerah serta temu usaha petani-pengusaha.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebagai operasionalisasi dari program pembangunan kabupaten Bogor adalah sebagai berikut:

- Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung program **Program Peningkatan Kesejahteraan Petani**, yaitu pelatihan petani dan pendampingan petani.
- Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung **Program Peningkatan Ketahanan Pangan**, yaitu pengembangan intensifikasi tanaman padi, pasca panen padi, pengembangan perbenihjan/perbibitan, pengendalian hama terpadu dan pengadaan lumbung padi.

- Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung **Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian**, yaitu pengadaan sarana prasarana teknologi pertanian.
- Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung **Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian**, yaitu penyelenggaraan demplot, diseminasi teknologi dan kursus tani.



# VI. KEBUTUHAN INVESTASI



Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam pengembangan padi Kabupaten Bogor diperlukan investasi yang besar. Kebutuhan ini dapat dipenuhi baik oleh pemerintah maupun swadaya masyarakat termasuk pihak swasta.

Kebutuhan investasi secara keseluruhan dalam kurun waktu lima tahun (2008 – 2012) sebesar Rp 159.198.825.000,- yang meliputi investasi untuk meningkatkan produktivitas, luas panen, dan produksi; meningkatkan kelembagaan penangkar benih padi; serta membuat gudang penyimpanan dan membangun kemitraan usaha. Jumlah investasi yang diperlukan berdasarkan pencapaian sasaran dapat dilihat pada Tabel 19.a, 19.b, 19.c dan 19.d.

**Tabel 19.a. Kebutuhan Investasi Peningkatan Produktivitas, Luas Panen dan Produksi Padi Kabupaten Bogor Tahun 2008 – 2012 (Rp. Ribu)**

No	Kegiatan	Tahun					Total
		Pokok	2008	2009	2010	2011	
<b>I. Peningkatan Produktivitas, Luas Panen dan Produksi Padi</b>							
1	Benih						
	- Hibrida	90,000	120,000	2,400,000	4,800,000	9,600,000	17,010,000
	(Ton)	2	3	60	120	240	425
	- Inhibrida	8,167,400	8,295,200	7,964,700	7,620,700	6,894,700	38,942,700
	(Ton)	2,042	2,074	1,991	1,905	1,724	9,736
2	Traktor	2,760,000	2,760,000	2,760,000	2,760,000	2,748,500	13,788,500
	(unit)	240	240	240	240	239	1,199
3	Pemetaan Irigasi	600.000	300.000	300.000	118.500	-	1.318.500
	Jumlah DI	400	200	200	79		879
3	Perbaikan Irigasi	2,301,460	2,422,230	2,616,960	2,665,710	2,574,000	12,580,300
	(Ha)	1,803	1,694	1,830	1,865	1,800	8992
4	RMU	2,952,750	2,952,750	2,952,750	2,952,750	2,921,000	14,732,000
	(unit)	93	93	93	93	92	464
5	Pedal Threser	4,126,800	4,126,800	4,126,800	4,126,800	4,126,800	20.634.000
	(unit)	543	543	543	543	543	2,715
6	Sabit bergerigi	3,793,975	3,793,975	3,793,975	3,793,950	3,793,950	18,969,825
	(buah)	151,759	151,759	151,759	151,758	151,758	758,793
7	Banting bertirai	1.645.000	1.645.500	1.645.500	1.645.500	1.645.500	8.223.000
	(unit)	3.290	3.289	3.289	3.289	3.289	16.446
8	Bimbingan & pembi-naan/ demplot PTT	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	2,500,000
	(Kel)	50	50	50	50	50	250
	<b>Total I</b>	<b>27.437.385</b>	<b>27.415.455</b>	<b>29.559.625</b>	<b>31.482.500</b>	<b>35.303.450</b>	<b>151.198.825</b>

**Tabel 19.b. Kebutuhan Investasi Pemenuhan Kebutuhan Benih Padi  
Kabupaten Bogor Tahun 2008 – 2012 (Rp. Ribu)**

No	Kegiatan	Tahun					Total
		Pokok	2008	2009	2010	2011	
<b>II. Pemenuhan Kebutuhan Benih</b>							
1	Pendampingan teknis petani penangkar oleh petugas lapangan	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	500,000
	(Kel)	5	5	5	5	5	25
	<b>Total II</b>	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	500,000

**Tabel 19.c. Kebutuhan Investasi Pengembangan Usaha Pemasaran Padi  
Kabupaten Bogor Tahun 2008 – 2012 (Rp. Ribu)**

No	Kegiatan	Tahun					Total
		Pokok	2008	2009	2010	2011	
<b>III. Pengembangan Usaha Pemasaran</b>							
1	Gudang	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	7,500,000
	(m2)	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	10,000
	<b>Total III</b>	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	7,500,000

**Tabel 19.d. Kebutuhan Investasi Total Pengembangan Padi  
Kabupaten Bogor Tahun 2008 – 2012 (Rp. Ribu)**

No	Kegiatan	Tahun					Total
		Pokok	2008	2009	2010	2011	
<b>I. Peningkatan Produktivitas, Luas Panen dan Produksi Padi</b>							
	Total I	27.437.385	27.415.455	29.559.625	31.482.500	35.303.450	151.198.825
<b>II. Pemenuhan Kebutuhan Benih</b>							
	Total II	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	500,000
<b>III. Pengembangan Usaha Pemasaran</b>							
	Total III	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	7,500,000
	<b>Total I + II + III</b>	29.037.385	29.015.455	31.159.625	33.082.500	36.903.450	159.198.825

Kontribusi antara pemerintah dan swadaya masyarakat (termasuk swasta) diperkirakan 35 : 65 dengan rincian Pemerintah Pusat 10 %, Pemerintah Daerah Propinsi 10 %, Pemerintah Daerah Kabupaten 15 % dan swadaya masyarakat/swasta 65 %. Proporsi di atas dimaksudkan untuk memperbesar peran masyarakat dalam pengembangan komoditas padi, sehingga

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat lebih berfungsi sebagai fasilitator dan regulator, bukan lagi mendominasi sebagai pelaksana kegiatan. Rincian kebutuhan investasi disajikan pada Tabel. 20.

**Tabel 20. Kebutuhan Kontribusi Investasi Pemerintah Pusat, Propinsi, Kabupaten dan Swasta/Swadaya dalam Pengembangan Padi Tahun 2008 – 2012 (Rp)**

No	Tahun	Pemerintah Pusat	Pemerintah Propinsi	Pemerintah Kabupaten	Swadaya/ Swasta	Total
1	2008	2.903.738.500	2.903.738.500	4.355.607.750	18.484.300.250	29.037.385.000
2	2009	2.901.545.500	2.901.545.500	4.352.318.250	18.860.045.750	29.015.455.000
3	2010	3.115.962.500	3.115.962.500	4.673.943.750	20.253.756.250	31.159.625.000
4	2011	3.308.291.000	3.308.291.000	4.962.436.500	21.503.891.500	33.082.910.000
5	2012	3.690.345.000	3.690.345.000	5.535.517.500	23.987.242.500	36.903.450.000
	<b>Total</b>	<b>15.919.882.500</b>	<b>15.919.882.500</b>	<b>23.879.823.750</b>	<b>103.479.236.250</b>	<b>159.198.825.000</b>

# VII. DUKUNGAN KEBIJAKAN



Pencapaian sasaran pengembangan komoditas unggulan padi di Kabupaten Bogor harus didukung oleh iklim berusaha tani yang kondusif. Dalam hal ini perlu upaya dukungan kebijakan pemerintah yang berpengaruh terhadap pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan agribisnis padi yang dapat mendorong percepatan peningkatan investasi. Sebagai fasilitator dan regulator pemerintah wajib menerbitkan peraturan perundangan yang dapat memberikan jaminan kenyamanan dan keuntungan bagi masyarakat pelaku agribisnis padi.

Dalam upaya peningkatan produktivitas, luas panen dan produksi untuk mencukupi kebutuhan pangan lokal, maka dukungan kebijakan yang diperlukan antara lain :

- Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dan sarana prasarana pertanian yang lengkap seperti jaringan irigasi dan tataguna air hingga ke tingkat usaha tani, jalan usaha tani, ketersediaan lahan dan air, serta ketersediaan sarana produksi;
- Pengaturan pengendalian alih fungsi lahan pertanian melalui penerapan peraturan dan perundangan-undangan serta penegakan hukum yang optimal baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
- Perlindungan kepada usaha tani dalam bentuk subsidi baik terhadap sarana produksi maupun harga/pemasaran hasil, seperti subsidi pupuk, bantuan benih, bantuan uang muka pembelian alat mesin pertanian, skim kredit lunak serta penetapan harga dan stabilitas harga produk pertanian serta keringanan pajak.



Dalam upaya pemenuhan kebutuhan terhadap benih berlabel, maka diperlukan dukungan kebijakan antara lain:

- Revitalisasi sistem pendidikan dan penyuluhan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam penangkaran benih melalui diseminasi inovasi teknologi dan kelembagaan.
- Peningkatan peran lembaga penelitian dan perguruan tinggi dalam adopsi dan inovasi bioteknologi pertanian.

Dalam upaya pengembangan industri pemasaran dan olahan beras, maka diperlukan dukungan kebijakan antara lain :

- Pemberlakuan bea masuk (tarif) impor beras dan pengawasan pintu-pintu masuk bagi penyelundupan barang – barang dari luar negeri.
- Penumbuhkembangan lembaga keuangan khusus yang melayani usaha di bidang pertanian seperti bank pertanian, lembaga keuangan mikro maupun bank syariah.
- Pengembangan agroindustri (olahan primer) skala kecil dan menengah berbasis pertanian domestik di pedesaan.
- Penciptaan iklim investasi bagi swasta dalam mengembangkan agribisnis padi melalui fasilitasi komplementer, insentif dan kemudahan regulasi investasi.



# VIII. PENUTUP

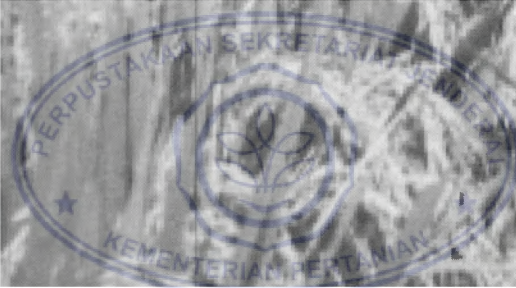
## DENPLOT DTT DENGAN SISTEM LEWOM

Jenis Padi : MAKHONGA  
Tgl. Tanam : 26 Juli 2006  
Jarak Tanam : 25 x 12,5 x 50 . cm  
PEMUPUKAN :

- Urea : 250 kg / ha  
- SP 36 : 50 " / ha  
- KCl : 50 " / ha  
Demotrasor : Fenydek Ransatan

- M. AGUS -

- DODO . SP -



Road map ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para petani dan pelaku usaha, penentu kebijakan, perencana, penyelenggara program dan pelaksana kegiatan pembangunan pertanian komoditas padi di Kabupaten Bogor. Road map ini juga diharapkan dapat menjadi instrumen bagi perencana pembangunan di tingkat Pusat maupun Propinsi dalam memverifikasi dan mengevaluasi usulan program dan anggaran Kabupaten Bogor.

Nomenklatur yang digunakan dalam menetapkan strategi, kebijakan, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang disusun dalam road map ini telah diupayakan konsisten dengan yang telah ditetapkan oleh Departemen Pertanian, Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Dengan demikian bila dalam jangka pendek terjadi perubahan terhadap nomenklatur tersebut, maka dalam perjalanannya akan dilakukan penyesuaian seperlunya dengan tetap berlandaskan pada substansi kegiatan teknis di lapangan.

Besaran kebutuhan investasi yang disusun dalam road map ini disusun dengan memperhitungkan proyeksi kebutuhan teknis di lapangan, maka dalam operasionalnya akan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara dengan melakukan upaya optimasi terhadap peningkatan proporsi peran swadaya masyarakat dan investasi ekonomi swasta.



## LAMPIRAN 1.

### Perhitungan LQ Beberapa Komoditas Tanaman Pangan Kabupaten Bogor

No	Komoditas	Rata-rata Luas Panen Tahun 2001-2005 (Ha)		Nilai LQ
		Kab. Bogor	Prov. Jabar	
1	Ubi Jalar	3,930	30,705	2.66
2	Ubi Kayu	10,655	118,505	1.87
3	Padi Sawah	80,517	1,690,935	0.99
4	Kacang Hijau	362	13,512	0.56
5	Kacang Tanah	2,176	70,490	0.64
6	Padi Gogo	4520.8	125,025	0.75
7	Jagung	2,837	117,755	0.50
8	Kedele	187	21,063	0.18
	Total	105,184	2,187,989	



## LAMPIRAN 2.

### Matriks Arah Pengembangan, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pengembangan Agribisnis Padi Kabupaten Bogor

ARAH PENGEMBANGAN	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Peningkatan produksi melalui peningkatan luas panen dan peningkatan produktivitas		Peningkatan produktivitas 2 - 4 % (67,62 ku/Ha pada tahun 2012)	Optimalisasi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur, sarana dan prasarana produksi serta teknologi budidaya padi
Pengembangan kelembagaan kelompok tani	Memenuhi kebutuhan beras penduduk dari produksi sendiri	Peningkatan luas panen 6,54 % (82.229 Ha pada tahu 2012)	
		Peningkatan produksi menjadi 556.019 ton GKP pada tahun 2012	
Pengembangan permodalan usaha	Memenuhi kebutuhan benih petani dari produksi penangkar benih lokal	Peningkatan kapasitas kelembagaan penangkar benih menjadi 25 kelompok pada tahun 2012	Pemberdayaan kelembagaan tani penangkar benih padi
Pengembangan usaha pasca panen, pengolahan dan pemasaran		Perbaikan pasca panen untuk meningkatkan mutu produk beras	
	Mengembangkan usaha pemasaran dan industri olahan beras	Berkembangnya kemitraan usaha pemasaran	Optimalisasi prasarana usaha dan kemitraan usaha
		Berkembangnya industri pemasaran beras berkualitas pada tahun 2025	

road map  
**agribisnis**  
**padi**  
**KABUPATEN BOGOR**



DEPARTEMEN PERTANIAN  
SEKRETARIAT JENDERAL BIRO PERENCANAAN  
2007